

PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT TORAJA



Ritha Tuken

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG HAK CIPTA

PASAL 113

KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT TORAJA

RITHA TUKEN



PENERBIT: AGMA

PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT TORAJA

Penulis:

Ritha Tuken

ISBN: 978-623-92321-9-1

Penyunting:

Yonathan Saba Pasinggi

Perancang Sampul

Tim Agma

Penata Letak:

Agusalim Juhari

Diterbitkan Oleh:

AGMA



Redaksi:

Jl. Dirgantara, Kel. Mangalli, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan. 92161

Telp: (0411) 8988093, HP/WA: 08114489177

Email: agma.myteam@gmail.com

Cetakan Pertama, Juli 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Rights Reserved

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa oleh karena limpahannya, penulis sehingga penyusunan Buku referensi yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja” dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Buku ini disusun dalam rangka memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja berdasarkan hukum adat, bentuk dan jenis-jenis harta warisan yang akan dibagi berdasarkan hukum adat, serta kendala pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja.

Dalam penyusunan buku referensi ini, tidak akan terwujud sebagaimana adanya tanpa bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih.

Parepare, Juli 2020

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 Pendahuluan	1
BAB 2 Hakikat Dan Istilah Hukum Adat.....	7
BAB 3 Pewaris Dan Ahli Waris Menurut Hukm Adat.....	13
BAB 4 Proses Pewarisan Dan Objek Hukum Adat Waris .	19
BAB 5 Rancang-Bangun Riset Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja Di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja.....	29
BAB 6 Gambaran Umum Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja	35
BAB 7 Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Kecamatan Sesean.....	51
BAB 8 Bentuk Harta Warisan Yang Akan Dibagi Menurut Hukum Adat.....	63

BAB 9	Kendala Yang Muncul Dalam Pembagian Harta Warisan	69
BAB 10	Pedoman Wawancara, Daftar Informan, Dan Istilah Yang Digunakan.....	75
DAFTAR PUSTAKA		87
RIWAYAT HIDUP.....		91

BAB 1



PENDAHULUAN

Peristiwa hukum yang biasa terjadi pada setiap manusia adalah masalah pembagian harta warisan. Hal ini disebabkan manusia hidup tidak untuk selamanya, pada suatu waktu manusia akan meninggalkan segalanya termasuk harta benda. Akibatnya, harta yang ditinggalkan sering menjadi problema keluarga sehubungan dengan pembagian harta warisan atau pusaka, akan bertambah rumit manakala di antara para ahli waris ingin menguasai harta peninggalan, sehingga berdampak merugikan orang lain. Tak ayal permusuhan antara satu dengan lainnya sulit dipadamkan, akhirnya dalam penyelesaiannya melalui pengadilan dan upaya lainnya.

Untuk itu masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan penyusunan hukum nasional diperlukan konsepsi hukum dan asas-asas hukum yang juga berasal dari hukum adat. Salah satu sumber yang penting dalam pembangunan hukum nasional yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia bersumber dari hukum adat, guna pembinaan hukum nasional adalah hukum waris adat yang di dalamnya mengatur pola pembagian harta warisan.

Hukum adat sangat erat hubungannya dengan suatu peristiwa kematian, karena dengan peristiwa kematian tersebut maka seseorang meninggalkan harta dan ahli waris, yang

kesemuanya diatur dalam hukum. Menurut Ramulyo, (2000:36) bahwa “Hukum Kewarisan ialah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau Badan Hukum mana yang berhak mewarisi harta peninggalan, serta bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris dan berapa perolehan masing-masing secara adil dan merata.”

Hukum kewarisan menurut sifatnya adalah hukum yang mengatur yaitu yang memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur kekayaan orang setelah pemiliknya meninggal dunia, artinya selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan dan kekayaan itu tidak akan di bawa setelah dirinya meninggal dunia. Kekayaan ini akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dari yang meninggal dunia atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya.

Adapun kelompok ahli waris sebagaimana ditegaskan dalam instruksi presiden RI.N0.1 tahun 1991 pasal 171 (1999/2000:83) yaitu menurut hubungan darah, dan menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pengertian lain tentang hukum kewarisan yaitu bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup termasuk anak kandung, anak angkat, dan juga keluarga lain. Tentang peralihan harta kekayaan ini sangat dipengaruhi dan tergantung pada sistem susunan kekeluargaan yang dianut pewaris tersebut.

Hal ini sejalan yang dikemukakan Ter Harr (1994) hukum kesianak-saudaraan biologis dapat menimbulkan berbagai macam akibat hukum, pada umumnya dimana-mana terdapat suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kesianak-saudaraan orang

tua terhadap anak-anaknya hubungan tersebut tergantung dari berbagai macam jenis perkawinan orang tuanya. Selain itu terdapat pula akibat hukum yang ditimbulkan dari keturunan sesama nenek moyang, namun sampai sejauh mana berlakunya atau apakah berlakunya ke arah kedua pihak atau hanya satu pihak, apakah keturunan dari satu pihak sama akibat hukumnya terhadap keturunan dari pihak lainnya, hal ini tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, karena harus dilihat dan diselidiki tersendiri dalam suku bangsa masing-masing individu.

Dalam masyarakat adat pertentangan terjadi apabila ada salah satu dari mereka tidak merasa puas dengan pembagian warisan yang diturunkan kepada masing-masing ahli waris atau persengketaan antara anak dengan anak angkat lainnya, anak angkat dengan anak saudaranya, bahkan muncul anak di luar nikah yang sebelumnya tidak termasuk dalam lingkungan keluarga juga menuntut haknya sebagai anak.

Pada umumnya hukum adat dalam menentukan ahli waris digunakan dua macam garis keturunan pokok yaitu :

1. Garis keturunan utama adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan utama dari golongan-golongan keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan ini pertama didahulukan dari golongan-golongan berikutnya. Golongan ini terdiri dari keturunan pewaris, orang tua pewaris, saudara-saudara pewaris, kakek pewaris dan leluhur pewaris.
2. Garis keturunan pokok pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan orang-orang dalam golongan-golongan pokok utama yang akan menjadi ahli waris.

Hukum adat setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia berbeda-beda berdasarkan adat mereka masing-masing. Keanekaragaman hukum adat waris merupakan kekayaan nilai-nilai budaya bangsa, sebagai pranata hukum tradisional (hukum adat) masyarakat yang sangat berharga dalam rangka pengembangan hukum nasional Indonesia. Demikian halnya hukum waris adat yang terdapat di TanaToraja Sulawesi Selatan.

Proses pembagian warisan di Tana Toraja berdasarkan hukum adat dalam pelaksanaannya membantu masyarakat Tana Toraja dalam pembagian harta waris dari pewaris. Selain itu turut menentukan dalam proses pelaksanaan upacara adat kematian pewaris. Harta warisan akan beralih ke anak-anaknya sebagai ahli waris dengan berdasar pada penyembelian kerbau yang disesuaikan dengan banyaknya kerbau yang di sembeli oleh anak-anaknya, sesuai dengan peringkatnya masing-masing.

Dalam hukum adat Toraja pembagian warisan dikelompokkan dalam dua bagian warisan semasa orang tua masih hidup disebut “Ba’gi” dan pembagian pewaris sesudah meninggal yaitu “Pa’tallang”. Ba’gi yaitu sebahagian harta orang tua dibagi secara merata kepada anak-anaknya pada saat orang tua masih hidup, sedangkan harta yang belum di bagi orang tua akan diperoleh anak-anaknya melalui Pa’tallang pada saat dia meninggal dunia. Istilah “pa’tallang” pembagian harta warisan berdasarkan pengorbanan kepada orang tua pada saat dia meninggal dunia.

Pada studi pendahuluan di Kecamatan Sesean yang sudah dimekarkan menjadi lima kecamatan yaitu: Kecamatan Sesean induk, kemudian dibagi Kecamatan Sa’dan Balusu dan dimekarkan lagi menjadi Kecamatan Sa’dan dan Kecamatan Balusu. Kemudian Kecamatan Sesean di bagi lagi menjadi Kecamatan Bangkele Kila’, kemudian Kecamatan Sesean Suluara”. Untuk mengawali pra penelitian ini telah dilakukan wawancara dengan toko adat yaitu

M.G. Pasang dan Y.T. Ramba' di kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Tana Toraja yang keduanya menyatakan daerah adat di Kecamatan Sesean adalah daerah adat Pekamberan yang dikuasai atau diperintah oleh penguasa adat Siambe'. Dalam pembagian warisan pertama harta orang tua yaitu "sawah" dalam bahasa Toraja disebut "Uma" sebelum meninggal sudah dibagikan sebagian kepada anaknya. Sebagiannya masih digarap untuk kebutuhannya selama orang tua masih hidup, nanti dibagi berdasarkan pengorbaan anak-anaknya yang akan dirinding berdasarkan banyaknya pengorbanan kepada orang tuanya.

Menurut Duli dan Hasanuddin (2003) sejarah Daerah Toraja ini, sejak dari dulu terbagi atas 3 (tiga) daerah adat masing-masing: Daerah Adat Kepuangan yang dikuasai atau diperintah oleh penguasa adat puang, daerah adat Pekamberan yang dikuasai atau diperintah oleh penguasa adat Siambe', daerah adat Kama'dikan yang dikuasai atau diperintah oleh penguasa Adat Ma' dika. Sedangkan menurut Tandilintin (1978) kepala pemerintahan daerah adat kepuangan adalah Puang, daerah adat Siambe' kepala pemerintahannya disebut parengnge', daerah adat ma'dika kepala pemerintahannya ma'dika.

Dari ketiga daerah adat ini, masih terbagi pula atas beberapa daerah kelompok adat, begitu pula atas beberapa daerah kelompok adat masih terbagi lagi atas beberapa daerah kesatuan adat dan kesatuan adat ini berdiri sendiri dengan penguasa adat sendiri, hanya keseluruhan kesatuan adat itu terkait dalam daerah kelompok adat tertentu karena adanya kondisi hidup serta pandangan cita-cita untuk kelangsungan hidup berlandaskan ajaran hidup dan kehidupan Aluk Todolo yang mempersatukan seluruh Daerah Adat Toraja sejak dari dahulu dengan bentuk pola-pola kebudayaan yang berdasar serta bercorak satu yaitu Kebudayaan Toraja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana Pembagian Harta Warisan

Berdasarkan Hukum Adat di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja". Alasan yang mendasar adalah di Kecamatan Sesean (Toraja bagian Utara) ada yang disebut Pa'tallang yaitu harta yang belum dibagi dan didapatkan berdasarkan sesuai dengan pengorbanan ketika orang tua (orang tua kandung atau orang tua angkat) meninggal dunia sedangkan di daerah lain tidak ada seperti Tallu Lembangna (Toraja bagian Selatan) dan Toraja bagian Barat.

Pertanyaan yang kemudian muncul untuk segera dijawab adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Toraja di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja? (2) Bagaimanakah bentuk harta warisan yang akan dibagi berdasarkan hukum adat Toraja di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja?, dan (3) Apakah terdapat kendala dalam pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Toraja di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja?

BAB 2



HAKIKAT DAN ISTILAH HUKUM ADAT

A. Hakikat Hukum Adat

Hukum adat sebagaimana dirumuskan oleh seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional /1975 sebagai hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana sini mengandung unsur agama, mempunyai kedudukan tersendiri, yang patut mendapat perhatian dari kita semua.

Hukum adat menurut pandangan para sarjana hukum terbagi atas tiga golongan yaitu: (1) golongan yang menentang hukum adat, (2) golongan yang mendukung hukum adat, (3) golongan moderat (Abdurrahman 1978)

Untuk lebih jelasnya hukum Adat menurut golongan yang menentang adalah hukum dari rakyat yang masih primitif, yang bersendikan atas tradisi banyak menghambat kemajuan, dan yang bersifat tidak tertulis sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum. Hukum adat menurut golongan yang mendukung adalah merupakan aliran yang mati-matian membela hukum adat, karena hukum adat adalah hukum yang paling cocok buat bangsa Indonesia sehingga oleh karenanya harus merupakan dasar bagi hukum nasional. Sedangkan golongan moderat merupakan pendapat jalan tengah di antara pendapat pertama dan kedua.

Pendapat ini menyatakan hanya sebagian saja dari pada hukum adat yang dapat digunakan dalam lingkungan tata hukum nasional.

Melalui seminar hukum adat pembinaan hukum nasional (15 s/d 17 Januari 1975 telah menyimpulkan bahwa hukum adat adalah merupakan salah satu sumber hukum yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional, pengambilan bahan-bahan untuk menyusun hukum nasional, merupakan salah satu unsur dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan hukum warisan, serta membentuk hukum nasional yang mengandung unsur-unsur hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum adat telah terserap dalam hukum nasional.

Sehubungan dengan itu hukum adat mempunyai kedudukan yang sangat penting sekali dalam rangka pembinaan hukum Nasional sebagaimana telah disepakati bersama dalam seminar hukum adat dan pembinaan Hukum Nasional. Di dalam pembinaan hukum harta kekayaan nasional, hukum adat adalah merupakan salah satu unsur, sedangkan dalam pembinaan hukum kekeluargaan dan kewarisan Nasional merupakan intinya.

Menurut Hazairin (dalam Abdurrahman, 1978:75):

Hukum adat hendaknya sangat lebih teliti dalam pemeriksaannya baik bahan-bahan menulis maupun bahan-bahan lisan hendaknya dicek sebaik-baiknya dengan juga menanyakan fakta-fakta hukum (kasus) yang dapat mendukung dan menyakinkan sungguh-sungguh masih berlakunya garis hukum yang disajikan orang kepada si peneliti.

Menurut Utrecht (1964:215) "Hukum adat ialah bagian dari tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat." Sedangkan adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada, merupakan tradisi dalam masyarakat bumi putra artinya kaidah-kaidah tersebut ditaati anggota berbagai persekutuan hukum yang ada di Indonesia, misalnya persekutuan hukum orang Batak Karo,

Minangkabau, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Ambon, dan sebagainya. Sebagian orang menganggap bahwa kaidah-kaidah tersebut kehendak nenek moyang, sebagian kejadian-kejadian alam yang bersifat gaib yang tidak dapat dimengerti oleh manusia biasa. Ada juga menganggap peraturan itu sudah turun-temurun yang berasal dari agama yang bersifat tradisi. Adat istiadat yang mempunyai reaksi masyarakat terhadap perbuatan salah satu anggotanya disebut hukum adat.

Mengetahui sesuatu itu adalah adat atau hukum adat dengan kata lain adat yang bersanksi atau adat yang tidak bersanksi dapat dilihat dari keputusan-keputusan yang berkuasa dalam persekutuan hukum adat mengenai persoalan-persoalan yang diselesaikan oleh para penguasa adat. Oleh karena itu cara dalam beberapa hal kehidupan yang membina berlangsungnya dan berkembangnya kebudayaan daerah adat, dan tiap daerah adat itu berkembang menurut adat dan kondisi alam serta kedudukan penguasa masing-masing daerah adat.

Dari penjelasan tersebut di atas jelaslah bahwa hukum adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan, baik yang materil maupun yang immateril dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya, serta sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.

Proses peralihannya sendiri sudah dapat dimulai sejak pemilik harta kekayaan itu masih hidup, berlanjut terus hingga pada gilirannya kelak keseluruhannya berkewajiban meneruskan proses itu kepada generasi berikutnya.

B. Istilah Hukum Adat

Hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam Bahasa Belanda: *Adatrecht*. Istilah *adatrecht* pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje, pada tahun 1893 yang menyatakan hukum

adat rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi artinya tidak tertulis dalam bentuk kitab Undang-Undang yang tertentu susunannya.

Hukum adat yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil dipengaruhi oleh hukum Islam. Hukum adat itupun melindungi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan adat yang dimana ia memutuskan perkara.

Menurut Supomo (1963:6) "Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional dan merupakan suatu hukum yang hidup, karena hukum adat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat."

Menurut Suhardi (1964:5) "Secara harfiah kata adat berasal dari Arab berarti "kebiasaan" kata adat itu sudah di terima dalam semua bahasa di Indonesia sehingga untuk menentukan dan membedakan peraturan-peraturan hukum lainnya yang menjadi acuan bagi masyarakat adat maka dibubuhkan kata hukum dengan (hukum adat)."

Supomo (1963:8) bahwa "Usaha untuk mengkodifikasi hukum adat ini pemerintah belanda senantiasa gagal dalam perumusan menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa terutama dalam lapangan hukum keluarga dan waris."

Van Dijk (dalam Muhammad, 1987:12) bahwa "Hukum adat adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang timur asing (orang Tionghoa, orang Arab, dan lain-lain)."

Berdasarkan sumber hukum dan tipe hukum adat, maka daerah lingkungan hukum (*Rechtskring*) di Indonesia sistem hukum adat dibagi dalam tiga kelompok, sebagai berikut:

- a. Hukum adat tata negara (Tata Usaha Rakyat), meliputi semua yang mengenai hukum beserta ketertiban dalam persekutuan-persekutuan rakyat, persekutuan adat beserta susunan dari lingkungan pekerjaan, alat perlengkapan, jabatan-jabatan dan pejabatnya seperti susunan desa, kepala-kepala desa dan sebagainya.
- b. Hukum adat mengenai warga. Meliputi hukum pertalian anak, perkawinan waris, hukum tanah (hak-hak tanah, transaksi tanah), dan hukum perhutangan (hak-hak atasan, transaksi tentang benda-benda lain, jasa dan sebagainya).
- c. Hukum adat mengenai delik (Hukum Pidana). Menurut peraturan-peraturan tentang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadapnya (A. Djamali 1993:71)

BAB 3



PEWARIS DAN AHLI WARIS MENURUT HUKM ADAT

A. Pewaris

Dalam kamus Bahasa Indonesia (1995:1225) dikemukakan bahwa “Pewaris adalah orang yang mewariskan.” Selanjutnya Sukanto dan Taneko (1983: 288) mengemukakan “Pewaris adalah seorang yang meninggalkan harta warisan.”

Menurut Suparman (1991) pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Dari uraian hal tersebut di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan hartanya yang diperoleh semasa ia hidup.

Pewaris dapat mengalihkan warisannya kepada orang lain melalui wasiat. Pemberi wasiat dapat menunjukkan ahli warisnya sebagai pewaris yang statusnya kemudian sederajat dengan status ahli waris atau dengan cara pewaris membagi-bagi warisannya kepada orang-orang tertentu melalui amanah. Pemegang amanah itu tidak memiliki status ahli waris, tetapi hanya dapat menuntut para ahli waris sesuai dengan yang tercantum di dalam wasiat.

B. Ahli waris menurut hukum adat

Menurut Muhammad (2000), ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Kemudian Suparman (1991) mengemukakan bahwa ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan.

Soekanto (2002) mengemukakan bahwa ahli waris adalah orang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan di mana mereka yang menjadi ahli waris adalah mereka yang menjadi besar dan hidup sangat dekat dengan si peninggal warisan. Oleh karena itu, ahli waris yang pertama adalah anak-anaknya. Karena mereka adalah tergolong yang paling dekat dengan pewaris. Selanjutnya Yunus, A. Assaad (1987:2) bahwa “Kewarisan adalah perpindahan harta benda dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang masih hidup berdasarkan Al-Quran dan Al-hadiss”.

Di samping itu anak angkat juga termasuk ahli waris, karena dipandang sebagai anak kandung, bukan sebagai orang asing, harta yang dapat diwariskan kepada anak angkat adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan (harta gono gini), bukan harta asal dari ibu bapak angkatnya. Selain itu, dalam masyarakat yang ber hukum ibu bapak (parental), pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah dua berbanding satu.

Menurut hukum adat, akibat-akibat hukum yang timbul dari hubungan orang tua dengan anak sebagai berikut: (1) kewajiban orang tua untuk mengurus anak-anaknya, (2) pada perkawinan anak perempuan ayahnya yang menjadi wali, dan (3) larangan perkawinan anak dan orang tua (Surjono Sukanto, dalam I Setywati, 1990:24).

Intruksi Presiden Ri Nomor 1 tahun 1991 pasal 171 (1999/2000:81) dijelaskan arti pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan sebagai berikut:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum itu menjadi ahli waris.
- c. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Selain dari akibat-akibat hukum yang telah dikemukakan dikenal pula beberapa golongan anak, seperti :

- a. Anak kandung adalah seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu seorang wanita dan ayah seorang laki-laki.
- b. Anak angkat yaitu seorang anak yang diambil oleh seorang suami istri dijadikan sebagai anak sendiri sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan.
- c. Anak tiri yaitu anak dari salah seorang suami atau istri yang diambil oleh seorang suami istri untuk dijadikan anak sendiri sehingga menimbulkan hubungan kekeluargaan.
- d. Anak Piara yaitu seorang anak yang diambil oleh seseorang atau suami istri menjadi anggota keluarga hanya sebagai perlindungan anak.
- e. Anak diluar kawin adalah anak diperoleh dari hubungan gelap antara laki-laki dan perempuan tanpa dinikahi (I Setywati, 1990:23).

C. Sistem kewarisan adat

Sistem kekeluargaan sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum adat waris terutama terhadap penetapan ahli waris dan bagian harta peninggalan yang diwariskan, hukum adat waris mengenal tiga macam sistem kewarisan, yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, misalnya Jawa, Batak dan Sulawesi.
- b. Sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) sebab harta peninggalan yang diwarisi itu tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris, misalnya harta pusaka di Minangkabau, Tongkonan di Toraja.
- c. Sistem kewarisan mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh seorang anak. Sistem kewarisan ini ada dua macam yaitu:
 - 1). Mayorat laki-laki yaitu apabila anak laki-laki tertua atau anak sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris misalnya di Lampung.
 - 2). Mayorat perempuan yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris misalnya pada masyarakat Tanah Semendo di Sumatra Selatan.

Sistem kewarisan adat yang berlaku di Sulawesi Selatan adalah sistem bilateral yaitu warisan berasal dari ibu dan bapak, sedangkan sistem kewarisan adat di Minangkabau adalah sistem matrilineal yaitu warisan berasal dari ibu. Sistem kewarisan adat yang berlaku di Ambon adalah sistem patrilineal yaitu warisan berasal dari bapak.

Hazairin dalam Soekanto (2002:260) menerangkan tentang sistem kewarisan tersebut di atas bila dihubungkan dengan prinsip garis keturunan yaitu:

Sifat individual ataupun kolektif maupun mayorat dalam hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang partrilineal seperti di Tanah Batak, malahan di Tanah Batak itu di sana sini mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif yang terbatas; demikian juga sistem mayoratitu, selain dalam masyarakat partrilineal yang beralih-alih di Tanah Sumendo dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat bilateral seperti Minahasa, Sulawesi Utara.

Dengan memperhatikan pendapat di atas, sukar kiranya bagi kita untuk menentukan dengan pasti dan tegas bahwa dalam suatu masyarakat tertentu dengan sistem kekeluargaan yang berprinsip menarik garis keturunan, memiliki sistem hukum adat waris yang mandiri yang berbeda sama sekali dengan sistem hukum adat waris pada masyarakat lainnya. Namun tidak demikian halnya sebab mungkin saja sistem kekeluargaannya berbeda sedangkan sistem hukum adat warisnya memiliki unsur kesamaan.

BAB 4



PROSES PEWARISAN DAN OBJEK HUKUM ADAT WARIS

A. Proses Pewarisan

Proses pewarisan adalah meneruskan dan mengoper barang-barang, harta benda dari suatu angkatan ke angkatan lain atau dari suatu keturunan ke keturunannya. Di dalam masyarakat Toraja keluarga-keluarga yang timbul karena perkawinan membutuhkan dasar kebendaan. Suami istri sebagai kesatuan keluarga yang terwujud karena perkawinan harus hidup bersama-sama dan untuk itu harus memiliki barang-barang sebagai pelengkap hidupnya.

Menurut I Setyowati (1990:23) bahwa “Barang-barang harta benda pewaris melalui ikatan perkawinan akan diwarikan kepada anak kandung, anak angkat, anak tiri, anak piara, dan anak di luar kawin yaitu anak diperoleh dari hubungan gelap antara laki-laki dan perempuan tanpa dinikahi.”

Haar (1979) mengatakan bahwa dimana proses meneruskan dan mengoperkan itu dimulai pada waktu orang tua masih hidup dan proses tersebut tidak menjadi soal apabila orang tua meninggal dunia.

Proses penurunan dan pengoperan harta benda pewaris maka pada penelitian ini sejalan dengan hal tersebut di atas, pewaris mempunyai harta yang terdiri dari barang-barang dari suami istri (orang tua). Semua barang-barang tersebut menjadi dasar materil bagi kehidupan turunan dari keluarga itu.

Menurut Ter Haar (1994) hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang selalu berjalan, tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materil dan imateril dari generasi kegenerasi berikutnya. Selanjutnya Soepomo (2003) mengemukakan hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses merumuskan serta mengalihkan barang-barang yang tidak berwujud benda (immaterielegoederen) dari suatu generasi manusia (generatie) kepada keturunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia.

Penurunan warisan menurut hukum adat Bugis Makassar dipengaruhi oleh hukum adat Islam di mana anak laki-laki mengambil warisan 2, sedangkan perempuan 1 dari harta pewaris. Begitu pula dengan hukum adat Mandar pembagian warisan juga berdasarkan hukum adat Islam. Harta gono gini suku Makassar disebut cakkara, sedangkan harta gono gini suku Bugis disebut balireso, serta suku Toraja disebut bunga rangka'na rampanan kapa'.

Sedangkan Suku Toraja khususnya Kecamatan Sesean anak-anak mewarisi harta dari kedua orang tuanya dengan cara membagi sebagian secara merata dan sisanya akan di tallang berdasarkan pengorbanan pada waktu orang tuanya meninggal dunia. Proses pewarisan kepada anak-anak yang mewarisi harta peninggalan orang tuanya sebagai berikut

Pemberian pewaris pada waktu ia masih hidup

Dengan suatu keluarga yang terdiri dari suami istri dan anak-anaknya layak jika ada pewarisan berupa harta di antara mereka, yang maksudnya saling menenangkan jangan sampai terjadi perselisihan dikemudian hari apabila orang tua sudah meninggal dunia. Di daerah Tana Toraja khususnya Kecamatan Sesean harta

yang dibagi yaitu sawah dan ladang, sedangkan tongkonan tidak di wariskan.

Pemberian warisan pada waktu hidup di sebut ba'gi. Ba'gi adalah suatu pemberian biasa yang dapat dilakukan sembarang waktu ketika pewaris masih hidup. Sedangkan pa'tallang yaitu sawah dan ladang yang belum dibagikan kepada anak-anaknya, nanti setelah meninggal dunia baru anak anaknya membagi sesuai dengan pengorbanan pada waktu pewaris meninggal dunia. Istilah pa'tallang yaitu penaksiran hewan yang disembelih untuk orang tuanya pada saat diupacarakan (pemakaman), kemudian sisa sawah dan ladang yang belum dibagi, dibagi berdasarkan taksiran itu.

Hibah wasiat

Dimaksud dengan hibah wasiat yaitu mewajibkan para pewaris untuk membagi-bagi harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris, selain itu untuk mencegah dan menyatakan sifat barang harta yang ditinggalkan seperti barang pusaka, barang gadai, barang di sewa dan sebagainya. Dalam hukum adat tidak ditentukan cara tertentu untuk mengadakan hibah wasiat sering kemauan terakhir diucapkan pada waktu si-peninggal warisan sudah sakit keras yang menyebabkan ajalnya. Apabila ucapan terakhir dari si-peninggal warisan yang meninggal di rumah atau rumah sakit disaksikan oleh keluarga terdekat pula sebagai saksi kecuali apabila si Pewaris ingin merahasiakan ucapan terakhirnya.

Sering terjadi ucapan terakhir mengandung anjuran kepada ahli waris untuk dengan ikhlas hati memberikan sebagian dari harta warisan kepada orang-orang yang hubungan kekeluargaannya agak jauh hanya karena ada tali persahabatan yang erat antara si Pewaris dengan yang bersangkutan.

Pewaris dapat mengalihkan warisannya kepada orang lain melalui wasiat. Pemberi wasiat dapat menunjukan ahli warisnya

sebagai pewaris dan statusnya kemudian sederajat dengan status ahli warisnya atau dengan cara pewaris membagi-bagi warisannya kepada orang-orang tertentu melalui amanah. Identifikasi ini tidak memiliki status ahli waris, tetapi hanya dapat menuntut para ahli waris sesuai dengan yang tercantum di dalam wasiat.

Menurut Kansil (1984:119) menyatakan bahwa “Perbuatan hukum terdiri dari dua yaitu perbuatan sepihak dan perbuatan dua pihak”. Perbuatan sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak, misalnya pembuatan surat wasiat dan pemberian hadiah suatu bendah (hibah). Sedangkan perbuatan hukum dua pihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban- kewajiban bagi dua pihak, mesalnya jual beli dan sewa rumah.

Semua hukum yang berlaku di Indonesia dari berbagai golongan mengenal lembaga yang dinamai hibah - wasiat, yaitu pernyataan kemauan terakhir dari seseorang yang wafat tentang apa yang dikehendaki akan terjadi dengan barang-barang peninggalannya. Kalau dalam hal ini hukum mengijinkan si Pewaris untuk menentukan cara pembagian harta warisan yang menyimpang dari hukum waris biasa, maka itu adalah layak. Karena pada hakekatnya seorang pemilik harta kekayaan adalah berhak penuh untuk memperlakukan miliknya menurut kehendaknya sendiri. Kemudian kemauan terakhir dari orang yang akan meninggal dunia pantas dihormati dan seberapa boleh dipenuhi. Yang menjadi persoalan ada kemungkinan kemauan terakhir itu didorong oleh paksaan atau tipu muslihat dari orang lain yang nantinya itu permintaan terakhir itu akan menguntungkannya.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1968:94) bahwa dalam “Hukum adat tidak diperbolehkan seorang peninggal waris dalam hibah wasiat menyampingkan seorang anak sama sekali dari pembagian harta warisan.”

Menurut hukum Islam 2/3 (dua pertiga) dari harta warisan harus tersedia untuk para ahli waris menurut hukum warisan, malahan apabila ahli waris itu miskin dianjurkan (sunnah) supaya sebagian harta warisan yang diberikan kepada orang lain diperkecil sampai kurang dari 2/3 (dua pertiga).

Menurut Suparman (1991:73) mengemukakan beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan adanya hibah atau wasiat yaitu:

- 1). Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
- 2). Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
- 3). Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.
- 4) Hibah antara suami istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang di hibahkan itu benda-benda yang bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Dari pendapat di atas jelaslah bahwa dimaksudkan dengan hibah atau wasiat adalah mewariskan harta semasa hidup. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta kepada siapapun.

B. Objek Hukum Adat Waris

Menurut Soekanto (2002) bahwa pada prinsipnya yang merupakan obyek hukum waris itu adalah harta keluarga yang terdiri dari :

1. Harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawah ke dalam keluarga;

2. Usaha suami atau istri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan;
3. Harta yang merupakan hadiah kepada suami istri pada waktu perkawinan;
4. Harta yang merupakan usaha suami dalam masa perkawinan;

Sejalan dengan hal yang dikemukakan di atas maka harta warisan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Harta pusaka yaitu suatu benda yang tergolong kekayaan di mana benda tersebut dianggap mempunyai kekuatan magis;
2. Harta bawaan yaitu sejumlah harta kekayaan yang dibawa oleh calon istri pada saat pelaksanaan perkawinan;
3. Harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh oleh suami istri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri;
4. Harta yang berasal dari pemberian seseorang, kepada suami atau istri maupun kepada kedua-duanya.

Harta warisan menurut hukum adat terdiri dari harta yang diperoleh sendiri, yaitu harta dibawah suami istri sebelum kawin, harta peninggalan, harta yang diperoleh seorang istri pada waktu perkawinan dan harta yang diperoleh seorang janda pada waktu suaminya meninggal dunia.

Golongan-golongan yang menjadi ahli waris

Golongan-golongan yang akan menjadi ahli waris di sini adalah siapa yang berhak untuk meneruskan harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Berikut ini

akan diuraikan golongan-golongan yang akan menjadi ahli waris sebagai berikut;

- a. Ahli waris sistem kekeluargaan patrilineal, terdiri dari:
 1. Anak laki-laki, yaitu semua anak laki-laki yang sah yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan, baik harta pencaharian maupun harta pusaka. Jumlah harta kekayaan pewaris dibagi sama di antara para ahli waris, misalnya seseorang mempunyai tiga anak laki-laki, maka masing-masing anak laki-laki akan mendapat sepertiga bagian dari seluruh harta kekayaan termasuk harta pusaka;
 2. Anak angkat, dalam masyarakat Karo anak angkat merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti anak kandung, namun anak angkat ini hanya menjadi ahli waris terhadap harta pencaharian/harta bersama orang tua angkatnya, sedangkan untuk harta pusaka anak angkat tidak berhak;
 3. Ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung si pewaris. Apabila anak laki-laki yang sah maupun anak angkat tidak ada, maka yang menjadi ahli waris adalah ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung si pewaris yang mewarisi bersama-sama;
 4. Keluarga dekat dalam derajat yang tidak tertentu, apabila anak-laki-laki yang sah, anak angkat, maupun saudara-saudara sekandung pewaris dan ayah ibu pewaris tidak ada, maka yang tampil sebagai ahli waris adalah keluarga terdekat dalam derajat yang tidak tertentu;
 5. Persekutuan adat, apabila para ahli waris yang disebutkan di atas sama sekali tidak ada, maka harta warisan jatuh kepada persekutuan adat.

- b. Ahli waris menurut sistem kekeluargaan matrilineal seperti yang terdapat di Minangkabau yaitu:
 - 1. Waris bertali darah yaitu waris sedarah yang terdiri dari waris satampok (waris setampuk), waris sejengkal (waris sejengkal), ada waris saheto (waris sehasta). Masing-masing ahli waris yang termasuk waris bertali darah ini mewaris secara bergiliran, artinya selama waris bertali darah setampuk masih ada, maka waris bertali darah sejengkal belum berhak mewaris dan begitu seterusnya;
 - 2. Waris bertali adat yaitu waris yang selama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak warisnya bila tidak ada sama sekali waris bertali darah.
- c. Ahli waris menurut sistem kekeluargaan parental atau bilateral yaitu:
 - 1. Ahli waris sedarah terdiri dari anak kandung, orang tua saudara, dan cucu;
 - 2. Ahli waris yang tidak sedarah yaitu anak angkat, janda dan duda.

C. Pengaruh Sistem Kekeluargaan Patrilineal, Matrilineal oleh Ahli Waris

Sistem kekeluargaan dalam masyarakat hukum adat dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor teritorial (daerah) dan faktor genealogis (keturunan) untuk kelangsungan masyarakat itu. (Ter Haar 1979;8). Kedua faktor tersebut di atas menetapkan bentuk dan susunan yang berbeda-beda misalnya bentuk hukum keturunan bapak (Vaderrechtelijk) dan bentuk hukum keturunan pihak ibu (Moederrechtelijk) serta susunan parental yaitu hukum keturunan pihak bapak dan ibu. Selain itu ada hukum keturunan dari pihak bapak dan ibu berganti-ganti (Alternerend).

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1930:10) bahwa "Susunan pertalian sanak dapat dibedakan dalam tiga bentuk yaitu: (1) susunan pertalian menurut garis bapak yang disebut patrilineal, (2)

susunan pertalian menurut garis ibu disebut Matrilineal, (3) menurut susunan pertalian menurut garis ibu bapak disebut parental.”

Pengetahuan tentang susunan masyarakat hukum adat di atas untuk menjadi dasar untuk menelaah hukum perkawinan dan hukum waris adat. Selain itu untuk lebih mengetahui peraturan-peraturan hukum adat di Indonesia sangat penting bagi kita untuk mengetahui tata susunan rakyat di suatu daerah yang dikenal dengan lingkungan hukum adat.

Pembagian lingkungan adat sangat erat hubungannya dengan pengambilan keputusan bagi fungsionaris hukum ditemukan dalam pembagian warisan yang mengakibatkan peristiwa hukum bagi praktisi hukum, seperti seorang hakim dalam memutuskan perkara pembagian warisan perlu mengetahui sistem atau susunan hukum adat setempat terutama dalam susunan pertalian sanak.

Muhammad (1987) bahwa masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis dubbel-unilateral adalah masyarakat hukum adat yang anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ayah dan garis ibu jalin-menjalin. Pengetahuan tentang susunan masyarakat adat di atas menjadi dasar pengetahuan untuk menelaah hukum perkawinan adat dan hukum waris adat.

D. Kerangka Pikir Proses Pembagian Warisan

Buku referensi ini membatasi diri pada masalah pembagian harta warisan di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja dikaitkan dengan hukum waris. Aspek hukum erat hubungannya dengan dengan yuridis formal sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban sebagai ahli waris jika pewaris meninggal dunia.

“Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, tumbuh di tengah masyarakat hukum adat dan ditaati serta dipertahankan sebagai peraturan yang memelihara tata tertib hukum di antara individu yang berinteraksi dalam masyarakat” (S. Wigjodipoero, 1984:75). Lebih lanjut dikemukakan bahwa hukum adat senantiasa

tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat berlaku.

Menurut Soekanto (2002:259) menyatakan bahwa “Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.” Proses ini telah mulai dalam waktu orang tuanya, proses ini telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu merupakan peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan bukan benda tersebut. Penjelasan tentang pembagian warisan menitikberatkan pada beberapa hal yang ada di antaranya adalah harta warisan itu sendiri, pewaris dan ahli waris yang akan meneruskan harta benda pewaris.

Untuk lebih jelasnya maka berikut ini akan dituliskan skema kerangka pikir proses pembagian warisan berdasarkan hukum adat



Gambar 4.1. Skema kerangka pikir

BAB 5



RANCANG-BANGUN RISET PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT TORAJA DI KECAMATAN SESEAN KABUPATEN TANA TORAJA

Riset ini bersifat kualitatif yang lebih berdasarkan pada falsafah Fenomenologis yang mengutamakan penghayatan serta menggunakan dan menafsirkan seluruh makna sesuatu peristiwa tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Bungin, Burhan, (2001:41) mengatakan Penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang menggambarkan sifat atau karakteristik suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, selain dapat menentukan frekuensi, penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala satu dengan gejala lainnya dalam suatu masyarakat.

Rancangan riset ini Bertitik tolak dari masalah dikemukakan pada bagian pendahuluan yakni untuk mengetahui (1) mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat Toraja di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja, (2) bentuk dan jenis-jenis harta warisan yang akan dibagi berdasarkan hukum adat Toraja di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja, dan (3) Untuk apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan hukum adat Toraja di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja.

Manfaat dari Hasil riset ini, nantinya diharapkan dapat menjadi: (1) Masukan untuk pelaksanaan pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja, (2) Memberikan kontribusi membedakan jenis-jenis harta warisan yang dibagi berdasarkan hukum adat di Kecamatan Sesean Kabupaten

Tana Toraja, dan (3) untuk perlindungan hukum dalam pelaksanaan pembagian warisan berdasarkan hukum adat di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja.

Riset ini mendiskripsikan pembagian harta warisan di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja kepada golongan-golongan yang berhak mendapatkan warisan. Sasrannya adalah seluruh kelurahan dan desa yang terdiri dari: 5 Kelurahan dan 4 desa (lembang) masing-masing: Kelurahan Pangli, Kelurahan Palawa', Kelurahan Bori', Kelurahan Pangli Selatan, Kelurahan Pangli, dan Lembang Buntu Lobo', Lembang Bori' Lombongan, Lembang Bori' Ranteletok, Lembang Parinding. (Kecamatan Sesean dalam Angka 2007:1)

S. Soekanto (1997:55) lebih tegas mengatakan bahwa :

Pendekatan dalam melihat hukum adat tidak cukup dari sudut ilmu hukum saja, tetapi harus disertai dengan pendekatan sosiologis dan antropologis sebab hukum adat senantiasa tumbuh dari kebutuhan yang nyata, cara hidup serta pandangan hidup empiris, yang keseluruhannya merupakan satu kebudayaan masyarakat Indonesia.

Adapun yang menjadi fokus dalam rancang-bangun riset ini adalah sebagai berikut:

1. Pembagian harta warisan di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja
2. Bentuk harta yang dibagi berdasarkan hukum adat di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja.
3. Kendala pembagian harta warisan yang ditaksir berdasarkan pengorbanan ahli waris.

Beberapa definisi konsep yang digunakan dalam riset adalah

1. Harta warisan menurut Hukum Adat Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja adalah harta yang dimiliki oleh

- pewaris. Harta ini dapat beralih kepada ahli waris apabila pewaris meninggal dunia;
2. Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta warisan yaitu orang tua kandung atau orang tua angkat yang mempunyai harta atau kekayaan yang tidak bergerak. Istilah dalam bahasa daerah misalnya Uma (sawah) harta ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain apabila pewaris mempunyai keturunan (anak) yang disebut (anak kandung) selain ada anak kandung ada anak tiri, anak piara sama kedudukannya dengan anak kandung;
 3. Sifat kekeluargaan di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja adalah susunan kekeluargaan yang menganut garis keturunan parental (pertalian garis ibu dan bapak) saling menjalin yang mempengaruhi sistem pewarisan dalam ikatan kekeluargaan;
 4. Ahli waris adalah mereka yang berhak menerima harta warisan dari pewaris;
 5. Pembagian warisan menurut hukum adat di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja menganut persamaan hak atas anak laki-laki dan anak perempuan.
 6. Ba'gi adalah Warisan dari orang tuayang dibagi secara merata pada saat dia masih hidup.
 7. Pa'tallang adalah pembagian harta warisan melalui pengorbanan kepada pewaris.
 8. Bunga rangka'na rangkanaan kapa' artinya harta yang diperoleh secara bersama dalam rumah tangga.

Jenis data dalam riset ini terdiri dari data primer dan data sekunder (Soekanto, 2002:14). Data primer, berupa data empiris yaitu data yang diperoleh langsung melalui responden dengan menggunakan teknik wawancara (interview guide) sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengkajian bahan pustaka berupa buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum dan dokumen-dokumen pada instansi yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan teknik dokumentasi.

Selanjutnya, pengumpulan data riset menggunakan teknik pengumpulan data/bahan antara lain:

1. Observasi digunakan untuk mengamati langsung dalam memperoleh data tentang pembagian warisan dengan cara ba'gi dan pa'tallang. Ba'gi sering dilihat di kalangan keluarga suami penulis, pada saat selesai duduk pengantin orang tua memberikan sepetak sawah dan sepetak ladang sebagai modal awal untuk memasuki rumah tangga. Sedangkan pa'tallang melalui wawancara oleh camat Sesean menyatakan setiap ada pesta orang kaya selalu dibicarakan tentang harta warisan yang belum dibagi. Kalau masih ada istri atau suami maka sebahagian hartanya ditinggalkan untuk hari tuanya. Camat lebih lanjut menyatakan seperti pada pesta Ne' Kussu baru-baru ini, sawah dan ladang sudah digarap oleh anak-anaknya tetapi belum dibagi oleh orang tuanya maka ke lima anaknya menyebutkan sawah dan landang yang diolah tetapi belum diberikan kepadanya di hadapan tokoh adat bersama dengan pemerintah setempat untuk ditaksir dan diberikan kembali sesuai dengan pengorbanannya. Kasus ini terjadi di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja;
2. Wawancara digunakan untuk menggali informasi yang sedalam-dalamnya dengan mengunjungi Ambe' Tondok, pemerintah setempat dan menayakan bagaimana cara pembagian warisan melalui ba'gi dan pa'tallang agar dapat ditarik makna dari proses pembagian warisan.
3. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data konkrit lapangan yaitu di Kecamatan Sesean dengan

mengunjungi tokoh adat dan pemerintah setempat, bukti fisik berupa foto pada saat wawancara tentang pembagian harta warisan melalui Pa'tallang.

Hal terakhir yang digunakan dalam rancang-bangun riset adalah pemilihan analisis data. Analisisnya menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah seluruh data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, memaparkan dan membandingkan kembali dengan mencocokkan teori yang ada hubungannya dengan fokus penelitian ini.

BAB 6



GAMBARAN UMUM KECAMATAN SESEAN KABUPATEN TANA TORAJA

A. Letak geografis Kecamatan Sesean

Secara umum Kabupaten Tana Toraja merupakan daerah pegunungan dan perbukitan terjal dengan ketinggian rata-rata 600 – 2800 m dari permukaan laut. Bentuk topografi bergelombang yang terdiri atas 20% dataran tinggi, 2% berupa rawa dan sungai, 40% perbukitan dan pegunungan, 38% dataran rendah. Luas Kabupaten Tana Toraja ialah 3.205,77 Kilometer persegi, terletak antara 119 - 120 derajat bujur timur (BT) dan 02 – 03 derajat lintang selatan (LS). Keadaan tanah pada umumnya terdiri atas jenis tanah litosol, regosol dan clay, menyebabkan daerah tersebut hanya untuk pertanian yaitu ladang dan persawahan.

Kabupaten Tana Toraja bagian utara terdiri dari 21 Kecamatan dan yang menjadi objek penelitian ini adalah Kecamatan Sesean di mana kecamatan ini sebelum pemekaran berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu sebelum dimekarkan menjadi empat kabupaten. Di Kecamatan Sesean terdapat gunung Sesean yang tertinggi di Tana Toraja ± 2000 kaki dari permukaan laut. Kecamatan Sesean termasuk daerah pegunungan yang udaranya sejuk $\pm 15^{\circ} - 25^{\circ}$ Celcius.

Kabupaten Tana Toraja pada umumnya, Kecamatan Sesean khususnya termasuk daerah kunjungan wisata di mana di Kecamatan Sesean terdapat rumah adat yang selalu di kunjungi oleh wisatawan manca negara terdapat di Kelurahan Palawa', kuburan batu (liang) dan kuburan anak-anak yang dimasukkan ke dalam pohon hidup yang terdapat di Kelurahan Bori. Juga terdapat kuburan

batu di lembang Deri dusun Lempo, serta patung Pong Massangka yang membunuh Antonie Aris van de Loosdrecht orang pertama yang membawah ajaran kristen di Tana Toraja.

Mata pencaharian masyarakat Sesean pada umumnya yang bertani yaitu membajak sawah dan berkebun, berdagang, serta sebagian dari anggota keluarga merantau ke seluruh wilayah penjuru Indonesia, bahkan ada bekerja di luar negeri.

Katalog Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Kecamatan Sesean dalam angka tentang luas lembang /kelurahan, jarak (Km) dan ketinggian dari permukaan air laut di Kecamatan Sesean dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1. Luas lembang/kelurahan, jarak (Km) dan ketinggian dari permukaan air laut di Kecamatan Sesean

Lembang/Kelurahan	Luas Area (Km ²)	Jarak (Km)		Ketinggian dari permukaan air laut
		Dari ibu Kota Kecamatan	Dari ibu Kota Kabupaten	
Pangli	4,25	0	25	720
Palawa'	6,00	2	27	720
Deri	4,01	5	30	1000
Buntu Lobo'	6,05	10	35	1200
Bori'	3,64	3	26	900
Parinding	3,99	6	27	1000
Bori' Rante Letok	5,00	4	29	1000
Bori' Lombongan	3,36	3	28	900
Pangli Selatan	3,36	2	22	720
Jumlah	40,05			

Dari tabel di atas menunjukkan jarak dalam km ibu kota Kecamatan Sesean dengan Ibu kota Kabupaten yang terdiri dari 9 lembang/kelurahan. Begitu pula dengan luas daerah masing-masing lembang/kelurahan, serta ketinggian masing-masing lembang/kelurahan dari permukaan laut.

B. Penyebaran penduduk

Beberapa sarjana telah mencoba merekonstruksi asal mula perpindahan penduduk Toraja berdasarkan bukti budayanya, baik penduduk Toraja yang ada di Sulawesi Tengah maupun yang ada di Sulawesi Selatan.

Kruyt C. (dalam Duli dan Hasanuddin, 2003: 6) menyatakan bahwa “Sebelum masuknya penduduk Toraja ke daerah pedalaman di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan terlebih dahulu sudah didiami oleh penduduk yang belum diketahui dengan jelas identitasnya”. Kruyt lebih lanjut mengatakan bahwa terjadi dua gelombang migrasi penduduk beserta kebudayaannya memasuki daerah pedalaman Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, yang belum diketahui dengan jelas jarak waktu di antara migrasi tersebut. Migrasi pertama disebut kelompok yang pemecah batu (Steenhouers). Mereka diperkirakan dari dua arah yaitu arah utara yang diduga berasal dari Kepulauan Jepang memasuki Sulawesi Utara terus ke Sulawesi Tengah dan kemudian di Sulawesi Selatan. Migrasi kedua disebut orang pembuat tembikar (de Pottenbakkers) yang berasal dari arah Selatan dan diperkirakan menyusuri sungai Sa’dan yang muaranya terus hingga ke hulu dan memasuki pedalaman menyebar di daerah Jasirah Utara Sulawesi Selatan dan sampai ke Sulawesi Tengah.

Berdasarkan ingatan kolektif masyarakat Toraja Selatan dan Toraja Sa’dan menurut Kruyt (dalam Duli dan Hasanuddin, 2003:9) menyatakan “Masyarakat Toraja yang terikat dalam suatu kesatuan Tondok Lepongan Bulan Matarik Allo yang terdapat dalam metodologi mereka”.

“Gelombang migrasi berikutnya datang dari orang-orang yang menggunakan perahu (lembang) yang dipimpin oleh kepala suku yang bergelar Puang Lembang” (Salombe 1972:11). Kelompok pendatang tersebut pertama kali berdiam di daerah Bambapuang dan kemudian mempersatukan kelompok-kelompok arruan yang telah ada sebelumnya dalam satu persatuan yang disebut Tallu Lembangna artinya tiga kelompok persekutuan besar yang mendiam

negeri Tondok Lepongan Bulan Matarik Allo, dengan pimpinan bergelar tallu Lembang. Gelar puang, kemudian menjadi gelar para bangsawan etnis Toraja dan Bugis. Persekutuan tersebut kemudian menjadi dasar dalam persekutuan-persekutuan kelompok adat dan negeri, terutama dalam memperluas wilayah kekuasaan dan untuk kepentingan politik.

Dasar persekutuan tallu leembang bahkan berlanjut terus sampai pada masa terbentuknya kerajaan-kerajaan pada etnis Toraja dan Bugis, seperti Kerajaan Tallu Lembangna. Kerajaan Tallu Batupapan, perjanjian Tallu Poccoe antara Kerajaan Bone, Soppeng dan Wajo. Timbulnya persekutuan-persekutuan tersebut sebagai akibat dari persaingan sehingga terjadi peperangan di antara kelompok yang berlangsung terus menerus, sehingga muncullah dewa penyelamat yang disebut dengan to manurun (Toraja) atau to mannurung (Bugis).

Menurut Tangdilintin (1980:27) konsep Tomanurun atau orang yang turun dari kayangan (langi') yaitu "Seorang pemimpin yang merupakan keturunan langsung dari dewa di kayangan yang diutus untuk memimpin manusia di bumi, yang telah mengalami kekacauan akibat peperangan antara mereka sendiri". Tomanurun datang pada daerah-daerah yang awalnya dilanda kekacauan, karena adanya persaingan di antara mereka dalam menduduki suatu kepemimpinan atau persaingan antara kelompok kesatuan adat dalam persekutuan daerah kekuasaan. Tomanurun yang tiba-tiba muncul tersebut, kemudian diangkat menjadi pimpinan mereka. Tomanurun dianggap selalu memiliki kelebihan seperti kecakapan, kecerdikan, bijaksana dan saleh.

Tomanurun yang turun dari kanyangan (langi') di tiga tempat yang paling terkenal menurut Tangdilintin (dalam Duli dan Hasanuddin, 2003:11) yaitu di Kesuk (Kecamatan Sanggalangi), di Kandora (Kecamatan Mengkendek), dan di Kaero (Kecamatan Sangngalla'). Namun, dalam metodologi rakyat Tomanurun banyak sekali, karena tiap-tiap daerah kesatuan adat mengenal adanya konsep tersebut dengan versi yang berbeda-beda di antara satu

daerah dengan daerah lainnya. Seperti Tomanurun dari Batu Tumonga di Sesean, Tomanurun di Rura, dan lain-lan.

Setelah mengamankan daerah-daerah kekuasaan, Tomanurun kawin dengan putri bangsawan dan keturunannya inilah yang akan melanjutkan kepemimpinan dalam masyarakat tersebut. Karena Tomanurun berasal dari kanyangan (langi'), maka nama belakangnya beserta para keturunannya selalu di tambah dengan kata langi' artinya keturunan dari langit. Gelar bangsawan mereka tetap menggunakan gelar sebelumnya seperti gelar puang, gelar siambe', dan gelar ma'dika.

Pengaruh-pengaruh luar yang mempengaruhi etnis Toraja adalah pengaruh dari kerajaan-kerajaan yang ada di sekitarnya seperti kerajaan Luwu', Kerajaan Bone, dan Kerajaan Sidenreng. Sejak berdirinya kerajaan Luwu' pada abat ke 13, maka tondok lepongan bulan sudah dianggap daerah asal dari kerajaan tersebut. Kecamatan Sesean sebelum dimekarkan berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu' sebelum kabupaten itu di mekarkan.

Menurut Katolog BPS (2017:7) menyatakan bahwa "Banyaknya penduduk Kecamatan Sesean adalah 11.190 Jiwa yang terdiri dari 9 lembang/kelurahan". Untuk Lebih jelasnya perhatikan tabel banyaknya penduduk menurut jenis kelamin sebagai berikut.

Tabel 6.2. Banyaknya penduduk menurut jenis kelamin di rinci perlembang /kelurahan

Lembang/Kelurahan	Laki-laki	Peremuan	Jumlah
Pangli	741	703	1444
Palawa'	764	739	1503
Deri	567	522	1089
Buntu Lobo'	828	724	1552
Bori'	556	559	1115
Parinding	562	524	1086
Bori'Ranteletok	652	656	1308
Bori'Lombongan	463	453	916
Pangli Selatan	613	564	1177
Jumlah/Total	5746	5444	11190

Sumber: Hasil Register Penduduk Akhir Tahun 2017

Dari tabel di atas menunjukkan keadaan penduduk Kecamatan Sesean dari setiap lembang/Kelurahan yang menunjukkan banyaknya laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh perbedaannya.

C. Masyarakat hukum adat di Kecamatan Sesean

Masyarakat Toraja sejak dahulu mengenal sistem pelapisan masyarakat yang bersumber dari ajaran kepercayaan leluhur yang disebut Aluk Todolo. Strata tersebut yang mengatur berbagai aspek kehidupan terutama dalam berinteraksi dengan masyarakat. Kedudukan seseorang yang diatur sesuai strata sangat mempengaruhi hubungan pergaulan, sehingga tampak adanya perbedaan baik dalam hal berpakaian maupun perilaku mereka sehari-hari. Hal ini akan menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam kehidupan masyarakat

Menurut Marampa (1980:30) bahwa “Toraja mempunyai tingkatan-tingkatan sosial yang dinamakan kasta (Tana’). Tana’ dibagi menjadi empat tingkatan yaitu : tana’ bulaan, tana’ bassi, tana’ karurung, serta tana’ kua-kua”. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Tana’ Bulaan yaitu lapisan bangsawan tinggi sebagai pewaris yang dapat menerima sukarana aluk, yakni kepercayaan untuk dapat mengatur aturan hidup dan dapat memimpin agama.
2. Tana’ Bassi yaitu lapisan bangsawan menengah sebagai pewaris yang dapat menerima kepercayaan untuk mengatur kepemimpinan.
3. Tana’ Karurung yaitu lapisan rakyat kebanyakan yang tidak pernah diperintah langsung, yang dapat menerima kepercayaan sebagai tukang atau orang-orang terpanggil.
4. Tana’ Kua-kua yaitu lapisan hamba atau budak yang harus menerima tanggung jawab sebagai pengabdian kepada para bangsawan.

Jadi peranan tana' dalam kehidupan masyarakat Toraja masih tampak pada sekarang ini, walaupun dalam pelaksanaannya tidak seketat zaman dahulu. Pelapisan sosial dapat dilihat pada penggunaan nama seseorang. Nama-nama tersebut biasanya diambil dari keturunan ayah maupun ibu yang tergantung pada keyakinannya.

Dalam pelaksanaan upacara jabatan-jabatan tertentu, Tana' sangat berperan di dalamnya. Golongan sosial yang menjadi pemimpin dalam setiap upacara dalam ajaran aluk todolo senantiasa merujuk pada tana' bulaan. Pelapisan sosial untuk tana' bulaan selalu diidentikkan dengan kekayaan dan kekuasaan. Hal itu tampak pada pelaksanaan upacara-upacara dengan pengurbanan hewan dalam jumlah yang banyak, kemudian dibagi-bagikan pada masyarakat yang berhak menerimanya.

Dewasa ini strata sosial lambat laun mulai bergeser dan tidak lagi didasarkan pada keturunan ataupun kedudukan melainkan berdasarkan tingkat pendidikan dan kemampuan dalam bidang ekonomi sehari-hari.

Masyarakat kelompok kecil khususnya di Kecamatan Sesean melalui kelompok adat sekarang ini tidak terlalu mempermasalahkan tentang kasta, dalam hal pengorbanan kepada orang tuanya. Kasta yang paling di bawah bisa mengikuti pengorbanan yang disesuaikan dengan kasta dengan jumlah kerbau yang dikorbankan khusus kepada orang tuanya. Akan tetapi anak-anaknya tetap berada pada kasta semula yang dia tempati..

Kelompok yang terkecil di masyarakat hukum adat di Kecamatan Sesean yaitu suami, istri, dan anak-anak yang belum kawin. Orang tua yang tak dapat berdiri sendiri lagi tinggal bersama anak dan kemandakan atau anak angkat. Keluarga kecil ini tinggal di suatu rumah atau pondok yang merupakan satu kesatuan dalam mata pencaharian misalnya mengerjakan sawah dan ladang. Peranan istri dan suami dalam suatu rumah tangga sama dalam hal perkawinan. Dalam upacara perkawinan biaya yang digunakan

ditanggung bersama oleh pihak pengantin perempuan dan pengantin laki-laki.

Tongkonan yang biasa digunakan sebagai tempat upacara pernikahan bertempat di pengantin perempuan. Pemilik tongkonan itu adalah warisan dari nenek moyang yang tidak bisa diwariskan kepada satu orang tetapi milik bersama. Di Kecamatan Sesean harta yang tidak bisa diwariskan adalah benda-benda pusaka, halaman lingkungan sekitar seperti tempat menanam bambu dan pohon buah-buahan, lapangan upacara (rante), serta sumur dan liang. Semuanya itu berfungsi sosial untuk keluarga tongkonan dan untuk masyarakat sekitarnya. Berkat dinikmati bersama melalui kebersamaan kerja, kebersamaan duka maupun suka, kebersamaan di dunia spiritual. Sedangkan sawah dan ladang dapat diwariskan kepada keturunannya, itulah sebabnya sawah dan ladang di Kecamatan Sesean dibagi-bagi dengan dua cara yaitu ba'gi dan pa'tallang. Di daerah lain seperti Tallu Lembangna sawah dan ladang tidak di bagi-bagi kepada keturunannya, siapa yang tinggal di tongkonan itu diberi kuasa untuk mengelolanya.

Tongkonan merupakan sumber adat (aluk) dan sumber kehidupan bagi keturunannya serta dapat mempersatukan keturunannya. Tongkonan dapat mempersatukan dan membina kekeluargaan dengan menceritakan asal usul para leluhurnya. Tongkonan juga mengharuskan hadir pada upacara rambu solo' (persembahan kepada leluhur), dan upacara rambu tuka' (penyembahan kepada dewa-dewa).

Sistem kekerabatan tongkonan berdasarkan prinsip bilateral, yang menjadi anggota tongkonan adalah keluarga pihak bapak maupun pihak ibu. Sebenarnya setiap orang yang menjadi anggota tongkonan bertanggung jawab kepada tongkonan yang lainnya yang ada di dalam kompleks tongkonan. Untuk menguraikan silsilah harus dimulai dari suami istri pendiri tongkonan. Kalau menguraikan silsilah dimulai dari pendiri tongkonan tertua misalnya dari nenek seluruh orang Toraja, menurut mitos yaitu nenek Tangdilino, yang pertama mendirikan rumah di

Banua Puang Mengkendek. Di antara silsilah-silsilah itu akan terdapat banyak pendiri tongkonan baru.

Menurut Duli dan Hasanuddin (2003:15) "Tangdilino diperkirakan hidup sekitar abad ke-7 dan telah menurunkan antara 40-45 keturunan sampai sekarang, tetapi tidak banyak orang yang dapat menulis silsilahnya. Keturunannya yang menyebar di Toraja dan mendirikan tongkonan-tongkonan baru yang ada di setiap kecamatan khususnya di Kecamatan Sesean".

D. Agama dan kepercayaan

Jauh sebelum masyarakat Toraja mengenal agama kristen dan islam di Toraja telah dikenal suatu aliran kepercayaan bersifat animisme yang bersumber dari dari leluhur mereka yang disebut Aluk Todolo. Pada masa sekarang mayoritas masyarakat Toraja menganut agama Kristen, hanya sebagian kecil yang beragama Islam. Setelah masuknya agama Kristen di daerah ini, situasi kehidupan berangsur-angsur mulai berubah terutama sikap dan tata cara hidup bermasyarakat, meskipun seluruhnya meninggalkan tata cara hidup yang bersifat tradisional.

Kehadiran agama dalam kehidupan masyarakat masih tetap berdampingan dengan kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan leluhur mereka. Seperti kepercayaan tentang hari-hari baik dan buruk. Dalam kesehariannya kemajemukan penganut agama selalu terlihat kerukunan dan tidak terjadi benturan antara penganut agama dan kepercayaan tersebut. Hal itu disebabkan oleh adanya saling pengertian dan cara menghargai sekaligus menghormati kepercayaan di antara mereka. Wujud saling menghargai itu juga terlihat pada sifat tolong-menolong dan mereka saling mengunjungi terutama pada hari raya.

Sebelum masuk agama, baik agama kristen maupun agama islam, masyarakat Toraja menganut kepercayaan leluhur yang telah diwariskan turun temurun sampai pada saat ini. Masyarakat Toraja percaya bahwa segala sesuatu dalam dunia ini

mempunyai nyawa, Marampa (1980:16) bahkan selanjutnya nyawa manusia hidup terus walaupun mereka sudah meninggal.

Kepercayaan dalam kesehariannya seperti orang yang sudah meninggal, biasanya diberi makan dan minum bahkan ada saja yang diberikan setiap jam makan. Itu menandakan bahwa mereka percaya seolah-olah Orang mati ini masih hidup karena selalu diberi kebutuhan makan dan minum walaupun sudah meninggal (ma'pakande tomate).

Kepercayaan turun temurun dianggap sebagai agama dan kepercayaan asli dan lebih dikenal nama aluk todolo. Menurut Tangdilintin ajaran aluk todolo, aluk artinya agama aturan sedangkan todolo artinya leluhur. Jadi aluk todolo yang artinya agama leluhur. Aluk todolo adalah salah satu bentuk kepercayaan animisme yang beranggapan bahwa tiap benda atau batu mempunyai kekuatan dan merupakan salah satu sistem religi yang secara tradisional telah dianut oleh warga masyarakat Toraja sejak abad ke IX Masehi dan tetap diwariskan secara turun temurun hingga sekarang.

Sedangkan menurut Duli dan Hasanuddin (2003:17), aluk todolo adalah salah satu kepercayaan atau keyakinan yang diturunkan oleh sang pencipta (Puang Matua). Aturan (aluk) diturunkan pada Datu Laukku yang berisi aturan agama bahwa manusia dan segala isi bumi ini harus menyembah. Penyembahan ditunjukkan pada Puang Matua sebagai sang pencipta yang diwujudkan dalam bentuk sajian. Puang Matua sebagai sang pencipta memberi kekuasaan kepada sang pemelihara (deata-deata).

Manusia diwajibkan mempergunakan segala yang ada dalam dunia dan sekaligus menyembah Puang Matua dan Deata-deata. Ajaran Aluk todolo yang memelihara pemujaan kepada kedua aliran tersebut di atas. Dalam ajaran aluk todolo dikenal tiga golongan deata yaitu: (1). sang pemelihara di langit (Deata tangnga langi), (2). sang pemelihara di bumi (Deata Kapadanganna), (3).

pemelihara yang menguasai segala isi tanah (Deata Tangngana Padang).

Berdasarkan ketiga Deata yang telah disebutkan di atas jelaslah bahwa ajaran aluk todolo mengonsepsikan adanya struktur dewa-dewa yang tersusun secara vertikal. Puang Matua di satu pihak di samping sebagai dewa tertinggi yang berperan sebagai pencipta seluruh alam. Sedangkan di pihak lain deata-deata berkedudukan pemelihara, penguasa, pengatur kehidupan ciptaan Puang Matua.

Puang Matua sebagai dewa tertinggi atau dewa yang dianggap Sang Pencipta seluruh alam yang diyakini bersemayam di bagian utara (karopakna langi), maka sebaliknya deata-deata dianggap bersemayam di bagian timur yang disebut matallo. Konsep ini menunjukkan bahwa Puang Matua tidak hanya mempunyai fungsi dan peranan tersendiri yang berbeda dari para dewa, tetapi tempatnya bersemayam pun berbeda.

Menurut Tangdilintin (1980:4): Aluk Todolo (aliran kepercayaan animisme) adalah aluk pitung sa'bu pitu ratu' pitung pulo pitu/aluk sanda pitunna / aluk 7777, yang berdasarkan 7 (tujuh) asas terdiri dari 3 (tiga) asas keyakinan atau asas agama yang dikenal dengan nama Aluk Tallu Oto'na dan 4 (empat) asas tata kehidupan yang berasal dari adak' a'pa' oto'na.

Aluk tallu oto'na yang didasarkan dengan agama atau keyakinan yang berdasarkan tiga oknum dipuja dan disembah dan dikatakan sebagai kesatuan tiga oknum masing-masing. Ketiga oknum tersebut sebagai berikut: (1) percaya dan menyembah kepada Puang Matua sebagai Oknum Sang Pencipta semesta alam, (2) percaya dan menyembah kepada Deata-Deata sang pemelihara ciptaan Puang Matua, (3) percaya dan memuja kepada Tomembali Puang atau Todolo sebagai oknum sang pemelihara dan pengawas serta pemberi berkat kepada manusia turunannya.

Dari ketiga oknum tersebut di atas menjadi satu kesatuan tiga oknum tetapi tidak sama kedudukannya serta tidak sama tingkatannya, makanya manusia dalam menyembah dan memuja

dengan cara yang berbeda-beda serta tingkat yang berbeda-beda, demikian pula kurban dan sajian persembahan ada perbedaan serta tempat mengadakan upacara persembahan itu berlain-lainan.

Ajaran aluk todolo mengonsepsikan adanya struktur dewa-dewa yang tersusun secara vertikal. Puang Matua di satu pihak dipandang sebagai dewa tertinggi yang berperan sebagai pencipta seluruh alam. Sedangkan di lain pihak, deata-deata berkedudukan sebagai pemelihara, penguasa-penguasa kehidupan ciptaan Puang Matua.

Dalam setiap kehidupan orang Toraja, selalu dibarengi dengan upacara seperti upacara yang diselenggarakan di bagian timur rumah tongkonan yaitu upacara kesukaan (syukuran). Syukuran adalah upacara pesta rambu tuka' seperti pesta pernikahan, pesta mangrara tongkonan , pesta yang diadakan di luar rambu solo'. Adapun upacara yang diadakan di sebelah barat rumah tongkonan menyangkut upacara kedukaan yaitu upacara kalambunan allo di mana matahari tenggelam. Demikian juga dalam kehidupan manusia akan menutup mata jika meninggal, sedangkan upacara menyangkut kehidupan dan kelahiran disebut upacara rampe mataallo.

E. Pelaksanaan upacara pemakaman

Upacara pemakaman di Tana toraja mempunyai dasar dan ketentuan khusus menurut keyakinan aluk todolo sebagai tempat berpijaknya seluruh sendi kehidupan dan kebudayaan orang Toraja yang peninggalannya masih tetap berakar hidup dalam masyarakat Toraja.

Menurut Tangdilintin (1980:25) bahwa manusia setelah mati mulai dari Ka'tu penaanna (putus nyawanya) mulai mendapat pembinaan dan perawatan sampai upacara pemakaman dan upacara penjelmaan Roh menjadi Tomembali Puang. Sedangkan Duli dan Hasanuddin (2003:25) menyatakan bahwa "Kematian bagi orang Toraja dianggap benar-benar telah mati apabila upacara kematian telah selesai dilaksanakan, baik yang dilaksanakan secara

sempurna maupun yang tidak dilaksanakan secara sempurna sesuai dengan adat". Orang yang baru mati sebelum diupacarakan, masih tetap dianggap sebagai orang yang sakit, sampai pada sanak keluarga yang telah siap untuk mengadakan upacara kematian.

Penyimpanan jenazah tersebut di atas ini berlaku umum bagi seluruh keluarga orang Toraja terutama yang beragama aluk todolo dan agama kristen. Bagi yang beragama islam sudah terjadi pula penyimpanan mayat di atas rumah dengan suatu cara tertentu yaitu dilakukan acara penguburan simbolis ke dalam peti yang diisi dengan tanah dan dilakukan upacara menurut agama islam sampai selesai.

Jenazah yang sudah dikubur ke dalam suatu peti yang namanya duni tetap di atas rumah sampai seminggu. Saat upacara adat Toraja untuk memenuhi adat mantaa serta tuntutan kehidupan yang berkepribadian orang Toraja dalam pengabdian kepada keluarganya. Sedangkan yang beragama aluk todolo, dan agama kristen mayat disimpan dalam waktu tertentu mengunggu kesepakatan keluarga untuk pemakamannya.

Mayat yang belum diupacarakan biasanya disimpan dalam suatu peti kemudian diletakkan di atas rumah dalam jangka waktu tertentu atau dikuburkan sementara, dan pada saat akan dilaksanakan upacara kematian maka peti mati diganti dengan peti yang baru. Bagi bangsawan tinggi, peti mati yang lama beserta perlengkapan lainnya yang dipergunakan selama dia dianggap sebagai orang yang sementara sakit, ditanam di sekitar tempat bermukim atau di sekitar Rante simbuang, biasanya terletak di sebelah barat berdekatan dengan menhir yang disebut dengan karopi' (susunan batu berbentuk persegi yang dipergunakan sebagai tempat penguburan pertama bagi para bangsawan Toraja).

Upacara pemakaman orang Toraja merupakan faktor yang menentukan karena upacara itu dikatakan ada jikalau kerbau dan babi yang dikorbankan sebanyak-banyaknya. Begitu pentingnya kurban kerbau dalam menghadap upacara pemakaman di mana peralihan orang mati ke alam gaib. Apabila dalam upacara

pemakaman semua persiapan sudah lengkap dan kurban kerbau belum mencukupi, maka upacara itu harus ditunda sampai cukupnya kerbau-kerbau menurut syarat yang diperlukan. Untuk persediaan kerbau dan babi merupakan halangan dalam menghadapi upacara karena kurban babi untuk sajian dapat saja diambil babi yang kecil-kecil menurut ajaran aluk todolo.

Menurut Tangdilintin (1980:79) adat pemakaman rapasan pada daerah dipekaambe' ada 3 (tiga) susunan upacara antara lain: 1) Rapasan sapu randanan dengan kerbau sebanyak-banyaknya, 2) Rapasan sundun dengan jumlah kerbau 24 (dua puluh empat) ekor karena menurut kasta Tana' Bulaan (bangsawan) dengan nilai hukumnya 24 ekor kerbau, 3) Rapasan diongan atau pa'layu-layu (bangsawan tidak berada) dengan kurban kerbau kurang dari 24 ekor, dan serendah-rendahnya 9 ekor kerbau. Upacara kematian tersebut dilakukan dua kali upacara yaitu aluk pia (upacara di rumah yang berduka), dan aluk rante (upacara yang di bawah ke tempat yang spesial disediakan untuk pesta kematian).

Kematian dan upacara pemakaman ini adalah salah satu sendi dari kebudayaan Toraja yang sangat sukar ditinggalkan begitu saja sekalipun sudah memeluk salah satu keyakinan di luar dari keyakinan aluk Todolo. Menurut aluk Todolo sebagai tempat berpijaknya seluruh segi kebudayaan Toraja, dalam hubungannya dengan upacara pemakaman sehingga harus diperhatikan oleh keluarga suku Toraja, ialah dengan keyakinan yang menyatakan bahwa "Puang Matua Ma'penduan iamo tu Tomatuanta belanna Puang Matua Ma'penpisanta iamo tu tomatuanta tu dipenombai keallo sia kebongi," Artinya Tuhan yang kedua bagi kita ialah orang tua/ibu bapak, karena Tuhan yang pertama ialah Tuhan Pencipta semesta alam yang dipuja siang dan malam.

Oleh karena itu ibu/bapak kita adalah Tuhan yang kedua, maka harus dijunjung tinggi dengan penuh rasa cinta kasih oleh anak-anaknya dan keturunannya. Sebaliknya, orang tua berkewajiban memelihara dan memberi kehidupan kepada anak-anaknya dan keturunannya. Ajaran aluk todolo dikatakan bahwa

“mati bagi manusia adalah perubahan status semata-mata” dan hidup di dunia nyata adalah bayangan hidup kemudian karena apa yang dialami pula di dunia gaib.

Mati merupakan perubahan status semata-mata, dan pengabdian serta pengorbanan yang tertinggi dalam masyarakat orang Toraja adalah pengabdian dan pengorbanan kepada orang tua sebagai pengabdian kepada Tuhannya yang kedua. Pada waktu masih hidup dan yang setelah mati, maka tanggung jawab kepada orang tua waktu masih hidup dilanjutkan pula pada waktu matinya lewat upacara-upacara pemakaman orangtua dan seterusnya. Pelantikannya atau penjelmaannya menjadi Tomembali Puang atau leluhur yang setengah dewa, yang kelak akan merupakan salah satu dari oknum yang dipuja dan disembah dalam kesatuan Tiga oknum dalam ajaran aluk todolo.

Penguburan orang aluk todolo pada umumnya dengan memasukkannya ke dalam Liang batu atau patane, sekalipun demikian sudah ada pula yang dikuburkan ke dalam tanah seperti pada penguburan orang kristen dan orang Islam. Tempat yang didiami sesudah diupacarakan disebut liang atau patane yang biasa dikatakan tongkonan tangmerambu (rumah tanpa asap).

Dengan selesainya penguburan, maka dengan resmi tidak ada lagi hubungan manusia dengan roh yang mati, dan sejak itu sudah dapat mengerjakan pekerjaan lain yang selama upacara pemakaman dilarang aluk panda dibolong (adat kematian). Pembersihan diri dari bengkalai-bengkalai pekerjaan selama upacara pemakaman yang dinamakan membase baik dengan kurban sajian ayam, ataupun babi menurut tingkatan upacara yang telah dilakukan, dan acara ini sudah lain yaitu sudah termasuk acara rambu tuka' kara sajian yang dilakukan kepada dewa-dewa yang menjaga rumah.

BAB 7



PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KECAMATAN SESEAN

A. Harta warisan menurut hukum adat Toraja.

Falsafah hidup dan kehidupan suku toraja yang telah membentuk masyarakat yang berdasar kesatuan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan yang menyebabkan susunan masyarakat Toraja kekerabatan yang Bilateral tidak sama dengan sistem kerabatan di daerah lain. Kedudukan suami istri sama, maka demikian pula seterusnya anak-anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam semua bentuk. Hal ini dibuktikan hukum warisan di Tana Toraja yaitu semua anak-anak mempunyai kedudukan yang sama sebagai pewaris dan mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama pula, dan disesuaikan dengan kemampuannya dalam pada saat mengadakan upacara rambu solo' melalui musyawarah penguasa-penguasa adat.

Menurut Tangdilintin (1980:114) bahwa "Penguasa adat terbagi atas tiga (3) kelompok wilayah adat yaitu, wilayah adat kapuangan, wilayah adat ma'dika, dan wilayah adat pekaamberan". Lokasi penelitian ini termasuk dalam wilayah adat pekamberan, apabila dalam pembagian harta warisan khususnya di kecamatan Sesean menurut hukum adat waris Toraja harus dimulai dan dilakukan di hadapan para penguasa adat setempat.

Penguasa adat setempat yang dimaksud terdiri dari To parengnge', Ambe' Tondok, To minaa, dan pemerintah setempat. Para penguasa tersebut akan memberikan petunjuk-petunjuk serta

nasihat mengenai cara yang terbaik dalam pelaksanaan pembagian warisan.

Menurut Dasius D. Rangan salah seorang Ambe' Tondok, menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk pembagian harta warisan yang belum dibagi orang tua sesudah meninggal harus melalui musyawarah dan mufakat dengan melihat pengorbanan masing-masing anak kepada orang tuanya pada saat diupacarakan. Lebih lanjut menyatakan hutang dan piutang juga didata dan dibagi bersama-sama dengan harta yang belum dibagi.

Hal senada dikemukakan oleh Y.P. Mangiwa sebagai Toparengne' bahwa harta warisan yang belum dibagi oleh orang tua kedua belah pihak, kalau masih ada salah satunya orang tuanya yang masih hidup, maka hanya separuhnya harta warisan yang dibagi berdasarkan dengan pengorbanannya. Sisanya yang belum dibagi dimiliki oleh orang tuanya yang masih hidup untuk tempat pencarian nafkah. Setelah meninggal dunia, maka harta yang tersisa itu akan dibagi berdasarkan dengan pengorbanan anak-anaknya. Pembagiannya didasarkan dengan pengorbanan yang disebut pa'tallang. Untuk membagi harta warisan tersebut diupayakan ada penguasa adat, petunjuk-petunjuk, serta nasihat mengenai cara terbaik dalam pelaksanaan pembagian warisan (Hasil Wawancara).

Jadi pembagian warisan melalui penguasa adat mendata harta yang belum dibagi baik harta bawaan maupun harta pencaharian bersama masing-masing suami istri selama perkawinan berlangsung. Setelah harta warisan itu telah diketahui penguasa adat kemudian meneliti tiap-tiap harta warisan tersebut yang dimiliki oleh pewaris seperti tanah, sawah, ternak, barang-barang berharga lainnya, serta hutang pewaris yang dicatat dalam buku hariannya termasuk di dalamnya.

Hutang yang diwariskan kepada ahli waris adalah hutang sebelum dan sesudah meninggal dunia yaitu hutang kerbau, babi dan lain-lain yang belum sempat dibayar pada saat dia masih hidup. Begitu pula pada saat orang tua diupacarakan, pihak keluarga turut berkorban membawa kerbau, babi, dan lain-lain dan mengatas

namakan orang tua dengan nama ma' waimata. Jika keluarga mengalami hal yang sama seperti di atas, maka wajib anak-anaknya turut mengambil bagian dalam upacara pesta kematian tersebut. Hutang orang Toraja dalam perspektif adat Toraja tidak akan pernah tuntas yang utuh karena persaudaraan masih dipegang teguh terutama dalam hal pengorbanan.

Menurut B. Kadang bahwa lasimnya sebelum upacara rambu solo' dimulai, ahli waris mengadakan musyawarah tentang utang pewaris pada saat masih hidup kepada si berpiutang. Oleh karena itu, si berpiutang harus datang menyampaikan bahwa ia mempunyai piutang dengan kata Sae mellambi' kalau tidak ada bukti berupa surat atau kwitansi, serta jenis piutang dan bagaimana bentuk dan sifatnya. Penyampaian dari orang-orang yang berpiutang pada musyawarah sebelum pelaksanaan pesta rambu solo' sangat penting, demi menjaga kemungkinan timbulnya pengelakan dari pada ahli waris bilamana telah tiba masa pengembaliannya. Penyampaian yang demikian disebut "Kada Mellambi". Kada mellambi' artinya penyampaian sebelumnya agar dimusyawarahkan sebelum upacara rambu solo' dilaksanakan (Hasil Wawancara)

B. Sistem pembagian harta warisan

Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris harus dilihat sumbernya apakah merupakan harta asal, harta bawaan, ataukah harta pencarian bersama. Jika pewaris memiliki bermacam-macam harta warisan menurut sumbernya yang telah dikemukakan di atas maka terlebih dahulu dipisahkan antara harta asal dan harta bawaan serta pencarian bersama.

Pembagian warisan di Kecamatan Sesean tidak menggunakan perhitungan secara ilmu pasti di mana masing-masing ahli waris mempunyai kedudukan yang sama pula, melainkan pembagian dilaksanakan melalui suatu musyawarah di antara sesama ahli waris dengan memperhatikan wujud barang yang ditinggalkan. Dalam pembagian warisan masing-masing pihak penerima harta warisan disesuaikan dengan haknya masing-masing.

Hal tersebut di atas sejalan yang dikemukakan oleh M. Sarrin yang menyatakan bahwa pembagian warisan yang diterima seseorang ahli waris tidak sama satu dengan yang lainnya, tetapi disesuaikan dengan pantunu (pengorbanannya) yaitu banyaknya kerbau dan babi yang dikorbankan (Hasil Wawancara)

Hal yang senada juga dikemukakan oleh S. Padang Allo bahwa besar kecilnya warisan yang belum dibagi oleh pewaris akan dibagi berdasarkan dengan pengorbanan ahli waris pada pesta rambu solo' (kematian) pewaris, semakin besar pengorbanannya semakin besar pula bagiannya dari harta warisan yang belum dibagi dan begitu pula sebaliknya semakin kecil pengorbanan semakin kecil pula bagian yang didapatnya. Pengorbanan tidak bisa dibandingkan dengan warisan yang diperolehnya. Biaya yang digunakan jauh lebih banyak kalau dibandingkan dengan harta yang diperoleh melalui Pa'tallang, hanya semata-mata sebagai penghormatan terakhir kepada orang tuanya. (Hasil Wawancara).

Dari wawancara di atas, bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris tidak sama nilainya. Hal ini disebabkan karena dalam pembagian warisan didasarkan pada besar kecilnya pengorbanan yang telah diberikan oleh masing-masing ahli waris dalam upacara rambu solo' pewarisnya.

Bertolak dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa betapa besarnya pengaruh pesta rambu solo' terhadap pembagian warisan, sehingga pelaksanaan pesta tersebut sangat erat hubungannya dengan pembagian harta warisan. Semakin besar pengorbanan ahli waris dalam pesta kematian pewarisnya, maka semakin besar pula harta warisan yang diperoleh. Sebaliknya apabila pengorbanan ahli waris sedikit, maka akan mendapatkan warisan sedikit pula.

Cepat atau lambat diadakannya upacara rambu solo' bagi orang tuanya (pewarisnya) di kalangan masyarakat Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja, tergantung dari persiapan-persiapan yang dilaksanakan oleh para ahli waris. Sebelum upacara dilaksanakan terlebih dahulu, diadakan musyawarah untuk

mengetahui apakah semua keluarga telah hadir, menyetujui dan sampai di mana persiapan-persiapan mereka untuk menghadapi upacara tersebut. Dalam musyarah ini hadir penguasa-penguasa adat untuk memberikan masukan saran dan petunjuk serta nasehat yang sehubungan dengan pelaksanaan upacara kematian pewaris di antaranya adalah penentuan waktu pelaksanaannya. Dalam rangkaian musyawarah ini, para ahli waris menyampaikan pula persiapan terutama kemampuan mereka untuk memotong kerbau dan babi serta perlengkapan lainnya.

Besar kecilnya pengorbanan yang diberikan oleh ahli waris adalah merupakan pencerminan dari bagian harta warisan yang akan diperolehnya nanti. Dalam pelaksanaan upacara rambu solo' ini masing-masing ahli waris berusaha dan memilih kerbau yang paling bagus yang harganya ratusan juta rupiah agar taksirannya disesuaikan dengan harganya, kemudian akan dipotong berdasarkan pengakuannya masing-masing. Kerbau dan babi yang dikorbankan itu ditaksir oleh penguasa adat melalui musyawarah dan mufakat dalam pembagian harta warisan.

Bagi orang Toraja khususnya Kecamatan Sesean, seekor kerbau jantan yang dipotong dalam upacara rambu solo' mempunyai tingkatan nilai yang berbeda-beda. Kerbau yang paling tinggi tingkatannya adalah tedong saleko (kerbau belang), kemudian tedong balian (kerbau dikebiri) yang buah pelirnya sudah dikeluarkan sejak kecil sampai menjadi besar, tedong bongaulu yaitu kerbau yang belangnya hanya terdapat di sekitar kepala dan leher (tedong bonga), tedong pudu' (kerbau hitam), dan lain-lain. Makin panjang tanduknya, makin tinggi nilainya dan disesuaikan dengan urutan tingkatannya.

Cara bersaing untuk memotong kerbau sebanyak-banyaknya dan berusaha untuk mendapatkan kerbau yang mempunyai nilai tinggi nampak dan sangat berpengaruh di Kecamatan Sesean, sebab si ahli waris berusaha mendapatkan warisan lebih banyak. Dalam sistem ini kerbau yang sudah dipotong oleh masing-masing ahli waris, dihitung berdasarkan banyaknya dan

tukaran dari kerbau-kerbau tersebut. Sistem inilah yang mendorong mereka untuk berusaha menukar atau membeli kerbau dengan nilai tinggi.

Untuk lebih jelasnya tata cara pembagian harta warisan di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja, dapat dikemukakan sebagai berikut.

Di Kelurahan Pangli Kecamatan Sesean telah dilaksanakan suatu upacara Rambu Solo', pesta ini dilaksanakan atas dasar musyawarah dan mufakat melalui pemangku adat setempat dengan para ahli waris yang berjumlah 5 orang dengan status masing-masing adalah anak kandung.

Adapun pengorbanan Ahli waris dalam bentuk pembagian warisan yang dipakai pada saat itu ialah pa'tallang yaitu disesuaikan dengan pegorbanan masing-masing ahli waris. Sebelum dilaksanakan pembagian warisan, maka bertindak sebagai hakim pada saat itu adalah pemangku adat setempat. Pemangku adat ini pertama-tama melakukan musyawarah terhadap tiap-tiap ahli waris tersebut mengenai tata cara pembagian harta warisan yang diperoleh masing-masing ahli waris, dan disesuaikan dengan dengan besarnya pengorbanan pada upacara rambu solo' pewaris atau orang tua mereka.

Upacara rambu solo' pewaris adalah sebagai berikut.

1. Anak pertama mengorbankan kerbau sebanyak 10 ekor dan babi sebanyak 40 ekor.
2. Anak kedua mengorbankan kerbau sebanyak 10 ekor sedangkan babi sebanyak 30 ekor.
3. Anak ketiga mengorbankan sebanyak kerbau 15 ekor sedangkan babi sebanyak 60 ekor.
4. Anak keempat mengorbankan kerbau sebanyak 8 ekor sedangkan babi sebanyak 30 ekor.
5. Anak kelima mengorbankan kerbau sebanyak 5 ekor kerbau sedangkan babi sebanyak 20 ekor.

Selain dari pengorbanan anak-anaknya ada juga dari keluarga terdekat yang turut dalam upacara rambu solo' tersebut,

pengorbanan kerbau dan babi ditujukan kepada orang mati yang istilahnya dinamakan “ma’waimata”. Kerbau dan babi yang dibawa keluarga dekat orang mati itu sebanyak 15 ekor kerbau dan babi sebanyak 40 ekor yang ditanggung oleh kelima bersaudara itu untuk pengembaliannya apabila keluarga itu juga mengadakan upacara rambu solo’.

Berdasarkan pengorbanan tersebut di atas, para penguasa adat duduk bersama-sama dengan ahli waris membicarakan dan menaksir kerbau serta babi yang disesuaikan dengan tingkatannya. Kerbau yang di korbankan taksiran tertinggi sebanyak 24 ekor kerbau sangpala’ yaitu kerbau yang panjang tanduknya diukur berdasarkan lebar telapak tangan mulai dari pergelangan tangan. Sesudah itu, kelima bersaudara ini membicarakan hutang kerbau dan babi dari keluarga. Apakah dibagi lima atau ditawarkan kepada kelima anaknya itu tentang siapa yang bertanggung jawab atas hutang itu. Anak yang tertua menawarkan kesediaan kepada adik-adiknya untuk menanggung hutang orang tua. Bila bersedia menanggung sendiri, maka ditambahkan ke dalam pengorbanan baru dibagi sesuai dengan taksiran dari penguasa adat.

Berdasarkan kesepakatan kelima bersaudara ini, maka penguasa adat memberikan saran/ nasihat kepada kelima bersaudara itu tentang harta warisan orang tuanya. Karena masih ada istri dari orang tua mereka maka hanya setengah dari harta warisan orang tua mereka yang akan dibagikan kepada kelima bersaudara. Sedangkan hutang ditanggung bersama kelima bersaudara sesuai dengan saran penguasa adat. Saran/nasihat yang dikatakan oleh penguasa adat diterima baik oleh kelima bersaudara, kemudian penguasa adat membagikan warisan itu berdasarkan pengorbanannya masing-masing.

Harta warisan yang diperoleh oleh kelima bersaudara sebagai berikut:

5. Anak pertama mendapatkan 5 Ha sawah, 1 petak tanah kering seluas 25 x 50 meter persegi.

6. Anak kedua mendapatkan 4 Ha sawah, 1 petak tanah ukuran kering 20 x 40 meter persegi.
7. Anak ketiga mendapatkan 7 Ha sawah, 2 petak tanah kering ukuran 25 x 50 dan 15 x 30 meter persegi.
8. Anak keempat mendapatkan 3 Ha sawah, 1 petak tanah kering ukuran 20 x 25 meter persegi.
9. Anak kelima mendapatkan 2 Ha sawah, 1 petak tanah kering ukuran 15 x 20 meter persegi.

Harta warisan tersebut di atas diperoleh sesudah selesai upacara kematian (rambu solo'). Sedangkan pembagian warisan dilakukan oleh pemangku adat dan pemerintah setempat yang ada pada saat pembagian harta warisan. Pengorbanan dengan hukum adat warisan tidak bisa dinilai dalam hal pertimbangan atau dalam nilai jual beli karena pengorbanan itu menyangkut pengorbanan terhadap orang tua kita. Darah yang mengalir dalam tubuh kita lebih besar daripada harta yang diberikan.

Jadi, tampak bahwa pembagian warisan dan besarnya masing-masing harta warisan yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris menurut hukum adat waris di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja dirasakan sangat adil. Hal itu terbukti setelah pembagian warisan ini selesai dilakukan, maka kelima bersaudara ini merasa senang mendapatkan warisan itu. Meskipun dalam prakteknya pembagian warisan tidak sama besarnya, namun kelima bersaudara itu (ahli waris) merasakan nilai harta warisan yang dididatkannya telah sesuai.

Upacara kematian yang dilaksanakan oleh kelima bersaudara tersebut merupakan kebanggaann tersendiri karena mereka telah selesai membuat pesta yang meriah terhadap orang tuanya dengan baik tanpa kendala sehingga terlaksana sesuai dengan rencana keluarga.

Demikianlah harta warisan yang telah diperolehnya melalui pa'tallang yang dinilainya sebagai suatu hal yang adil dan bertanggung jawab karena mampu diselesaikan secara kekeluargaan

melalui musyawarah adat yang dilakukan sesuai dengan tata cara atau prosedur pembagian harta warisan.

Sistem kewarisan di Kecamatan Sesean dikenal dengan dua cara yaitu ba'gi dan pa'tallang. Ba'gi yaitu pemberian orangtua pada saat dia masih kuat. Cara pembagiannya setengah dari harta orang tua dibagikan kepada anak-anaknya dan dihadiri oleh penguasa adat sebagai saksi dalam hal pembagian warisan itu. Sedangkan pa'tallang didapatkan melalui pengorbanan upacara kematian kepada pewaris. Apabila pewaris sudah tiada posisi dari pewaris digantikan anak laki-laki yang sulung di mana anak laki-laki yang bertanggung jawab kepada saudara-saudaranya, serta diangkat sebagai orang tua dari saudara-saudaranya.

C. Harta warisan kaitannya dengan kekeluargaan

Hasil wawancara penulis melalui beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Sesean menyatakan bahwa pembagian warisan di Kecamatan Sesean pada dasarnya mengutamakan sistem kekeluargaan di mana keluarga dari suami istri yang dipertemukan melalui ikatan perkawinan sudah menjadi satu keluarga besar yang mengedepankan kebersamaan.

Harta warisan yang akan beralih kepada ahli waris terkait dengan semua harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Semua harta bawaan suami istri, hasil usaha istri atau suami adalah harta bersama tanpa memandang asal-usulnya. Harta warisan yang ada selama dalam rumah tangga menjadi milik bersama dapat digunakan untuk kepentingan rumah tangga. (hasil wawancara), Kepala desa dan kelurahan di kantor Kecamatan Sesean).

Umumnya masyarakat Kecamatan Sesean dalam perkawinan memperoleh harta warisan yang beralih dari pewaris adalah sebagai berikut:

1. Harta yang diberikan orang tuanya kepada masing-masing suami istri berupa ba'gi pada saat memasuki rumah tangga.

2. Harta yang diperoleh melalui pengorbanan pada upacara rambu solo' kepada pewaris.
3. Harta bawaan masing-masing pihak yaitu harta bujangan yang diperoleh sebelum pernikahan.
4. Harta yang didapatkan selama dalam pernikahan yang disebut bunga rangka'na rampanan kapa' (harta bersama).

Semua harta warisan yang diperoleh di atas merupakan harta bersama yang dapat diwariskan kepada keturunannya kelak apabila anak-anaknya sudah mulai mandiri atau sudah menikah (Hasil Wawancara, K. Pasinggi).

Menurut Subekti & Tjitrosudibio. (2004:221) pada pasal 832 KUH Perdata, bahwa yang dapat mewarisi adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami dan istri yang hidup bersama. Yang dimaksud dengan para keluarga sedarah dalam pasal ini adalah hubungan darah, baik menurut garis lurus maupun garis menyamping. Dalam pasal ini terlihat seorang anak luar kawin dapat diperbolehkan mewarisi bersama-sama dengan ahli waris lainnya, namun dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas sejauh mana haknya untuk mewarisi, apakah disejajarkan dengan ahli waris lainnya atau mendapat bagian yang lebih sedikit dibandingkan dengan ahli waris sah lainnya.

Masyarakat adat di Kecamatan Sesean menganut sistem persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam hal harta warisan. Demikian pula anak angkat dari pihak istri atau suami sama kedudukannya dengan anak kandung, tidak ada perbedaan dalam hal harta warisan. Anak suami atau istri yang lahir diluar nikah, apabila tinggal bersama dengan bapaknya atau ibunya yang sudah menikah maka anak tersebut diangkat sebagai anak kandung dalam perkawinan tersebut. Anak angkat kehilangan haknya apabila kewajiban-kewajibannya dilalaikan dalam keluarga pewaris terutama dalam pemugaran tongkonan.

Apabila suami istri tidak mempunyai anak, hanya ada anak angkat maka sama kedudukannya dengan anak kandung.

Demikian pula jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang janda maka warisan jatuh kepada janda. Kalau seorang janda tidak punya anak, maka warisan kembali pada asalnya yaitu keluarga kedua belah pihak suami dan istri. Begitu pula apabila suami ditinggal mati oleh istrinya tanpa anak kandung dan anak angkat, maka apabila si duda telah tiada, harta warisan kembali kepada asalnya yaitu pihak keluarga kedua belah pihak suami dan istri (Hasil Wawancara,Y.T. Pasang).

Lebih lanjut dikemukakan mengenai anak sebagai ahli waris yang utama antara lain:

a. Anak kandung

Anak kandung adalah merupakan ahli waris yang utama baik terhadap ayahnya maupun ibunya. Di dalam hukum waris adat Toraja terdapat dua golongan ahli waris yaitu golongan solong dan golongan sarume. Ahli waris golongan solong adalah ahli waris yang berhubungan kekeluargaan sudah agak jauh dengan pewaris misalnya saudara-saudara pewaris. Sedangkan sarume adalah ahli waris paling dekat hubungan kekeluargaannya (pertalian darahnya) pewaris. Dengan demikian anak kandung adalah anak golongan sarume dan merupakan ahli waris yang utama. Apabila ahli waris mempunyai anak maka sanak saudara yang lain tidak menjadi ahli waris (golongan solong). Anak kandung laki-laki maupun perempuan tidak ada perbedaan dalam hal harta warisan.

b. Anak angkat

Pengangkatan anak atau adopsi anak dengan cara mengambil anak orang lain untuk diperlakukan sebagai anak sendiri. Di Kecamatan Sesean pengangkatan anak dapat dilakukan kepada anak saat masih kecil maupun sudah dewasa. Pengangkatan anak yang sudah dewasa biasa terjadi karena orang tua angkat sudah tua dan tidak kuat lagi mengurus hartanya, sedangkan dia tidak mempunyai anak. Kalaupun ada tetapi dianggap tidak mampu untuk

mengurus harta orang tuanya. Dalam pengangkatan anak biasanya dari keluarga pewaris sendiri.

c. Anak tiri

Adapun yang dimaksud dengan anak tiri dalam bahasa Toraja di sebut anak poro yaitu anak dari suami atau istri tetapi ibu atau bapaknya adalah orang lain. Di Kecamatan Sesean anak tiri bukan merupakan ahli waris dari bapak atau ibu tirinya, kecuali anak tiri itu sudah diangkat sebagai anak maka kedudukannya sama dengan anak kandung. Kalau anak tiri ikut dalam berkorban dalam upacara rambu solo', maka hal itu merupakan hutang bagi ahli waris yang harus dibayar jika ada pesta semacamnya.

d. Anak keponakan

Anak keponakan di sini adalah anak dari saudara pewaris baik saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Kedudukan anak keponakan tidak berarti jika pewaris memiliki anak kandung tidak akan mendapatkan warisan. Jadi keponakan tergantung dari apakah dia sebagai golongan sarume atau dia golongan solong. Sebab, jika tidak ada ahli waris lain yang dekat pertalian darahnya dengan pewaris, maka anak keponakan mempunyai kedudukan penting yaitu mempunyai kedudukan sebagai ahli waris yang utama atau sebagai ahli golongan sarume.

BAB 8



BENTUK HARTA WARISAN YANG AKAN DIBAGI MENURUT HUKUM ADAT

Berdasarkan hasil riset, informasi diperoleh bahwa bentuk harta warisan yang dapat dibagi oleh ahli waris di Kecamatan Sesean adalah sebagai berikut;

A. Ba'gi

Ba'gi adalah suatu harta yang diterima langsung dari pewaris atau orang tuanya yang dibawa masuk ke dalam rumah tangga suami istri. Umumnya harta warisan berupa sawah, tanah memiliki kedudukan dan nilai yang sangat tinggi. Sawah mempunyai nilai yang sangat tinggi dari harta warisan lainnya karena masyarakat di Kecamatan Sesean menganggap bahwa sumber makanan dan kehiduphidupan manusia dan hewan adalah asalnya dari tanah. Sejak lahirnya manusia selalu berhubungan dengan tanah, menerima bahan makanan dari tanah. Mereka percaya bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan kehidupannya sangat bergantung dengan tanah.

Masyarakat di Kecamatan Sesean berusaha sedemikian rupa untuk memiliki sebidang tanah terutama sawah walaupun hanya sepetak saja. Bagaimanapun miskinnya seseorang ia tetap berusaha memiliki sebidang tanah (Hasil Wawancara, T. Kadang). Lebih lanjut dikatakan bahwa ada harta yang dimiliki pewaris tidak dibagi seperti keris (Gayang), Kandaure, parang orang dulu (La'bo' Todolo), rumah Tongkonan. Barang-barang ini tidak dibagi dan

siapa yang tinggal di tongkonan itu, dialah yang akan memeliharanya.

Menurut Duli dan Hasanuddin (2003:15) bahwa “Tongkonan merupakan sumber aluk dan sumber kehidupan bagi keturunannya, yang dapat mempersatukan keturunannya, serta berusaha membina keturunannya dengan menceritakan asal usul para leluhurnya”.

Tongkonan dipimpin oleh keluarga atau anak tongkonan yang dituakan, sebab harus berhati bijaksana, kharismatik, serta menjadi tulang punggung keluarga dalam melaksanakan upacara. Semua anggota tongkonan bertanggung jawab atas pemeliharaan tongkonan dan menjaga nama baik tongkonan.

B. Daka' belangna/ pa'belang-belang.

Daka' belangna adalah harta yang diperoleh oleh suami atau istri sebagai hasil usahanya sendiri semasa ia masih perjaka atau gadis, dalam hukum waris disebut harta bawaan. Jenis harta bawaan berupa sawah yang dibeli sebelum nikah atau dia membuka tanah menjadi sawah yang disebut Pamakka, kerbau, babi, periasan dan lain-lain.

Pamakka diolah dan menghasilkan berupa beras, maka dijual ke pasar untuk membeli keperluan sehari-hari. Juga hasilnya berupa padi yang belum diolah jadi beras dapat dijual atau ditukar dengan seekor kerbau atau babi dan dapat dijadikan modal usaha melalui berdagang. Sesudah dianggap matang barulah menikah.

Cara lain untuk memiliki kerbau dan babi adalah dengan memelihara ternak orang lain. Kerbau atau babi dipelihara mulai dari kecil, apabila sudah besar yang memelihara mendapatkan setengah dari binatang peliharaan itu. Di Kecamatan Sesean biasanya masih banyak suami istri yang mengambil ternak orang lain untuk dipelihara, terutama babi karena babi banyak manfaatnya apabila ada upacara rambu tuka' (syukuran) orang tidak tanggung-tanggung meminta babi orang lain untuk ditukar dengan kerbau

kecil dengan perjanjian jangka waktu penyediaan kerbau itu melalui kesepakatan.

Kerbau atau babi merupakan harta bawaan dari seseorang yang dengan usaha sendiri untuk memilikinya. Menurut T. Kadang, umumnya pemuda atau pemudi yang sudah putus sekolah di Kecamatan Sesean sebelum memasuki rumah tangga sudah berusaha untuk mandiri dengan beternak. Kalau pemuda mengambil kerbau betina atau jantan orang lain untuk dipelihara, sesudah besar dijual dan harganya dibagi dengan perbandingan duapertiga yang diberikan kepada pemiliknya sedangkan sepertiga untuk yang memelihara. Begitu pula dengan kerbau betina sudah melahirkan tiga kali maka anak yang ketiga sudah dimiliki oleh yang memeliharanya.

Pemudi yang putus sekolah umumnya mengambil ternak babi betina dari orang lain untuk di pelihara. Nanti kalau sudah besar dan berkembang biak, maka anak-anaknya dibagi dengan perbandingan duapertiga untuk pemiliknya, sedangkan yang memeliharanya bahagiannya sepertiga. Bahagian dari ternak itu dijual untuk dibeliakan perhiasan sebagai modal awal sebelum memasuki rumah tangga.

C. Bunga rangka'na rampanan kapa'

Bunga rangka'na rampanan kapa' adalah harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan. Jenis barang-barang berupa sawah, tanah, perhiasan, dan lain-lain. Bunga rangka'na rampanan kapa' sama dengan harta gono-gini di Jawa dan harta bersama di Sumatra.

Dalam kehidupan rumah tangga suatu yang ada di masyarakat Kecamatan Sesean memberikan batas-batas yang tegas bilamana harta ba'gi, harta bawaan yang berkembang dalam perkawinan, misalnya sawah maka hasilnya merupakan harta bersama sedangkan sawah itu sendiri tetap sebagai harta bawaan. Untuk hewan ternak yang berkembang setelah perkawinan, maka

anak-anak dari ternak itu dibagi dengan perbandingan 2/3 masuk harta asal, sedangkan 1/3 untuk harta pencarian bersama.

Apabila suami istri bercerai, kemudian masing-masing kawin lagi, sedangkan di dalam perkawinannya yang pertama terdapat anak, maka harta pencarian bersama mengikuti anak tersebut. Sedangkan harta asal dan harta bawaan kembali ke asalnya. Antara harta pencarian dalam perkawinan pertama dengan harta pencaharian bersama dalam perkawinan kedua tetap merupakan harta yang terpisah.

Jika harta asal atau harta bawaan dari salah satu pihak lain, maka pihak yang telah mengambilnya akan tetap merupakan hutang yang wajib dibayar oleh yang berhutang. Jadi di sini nampak bahwa harta bawaan akan dibagi secara bersama oleh ahli waris. Pembagian harta bawaan dapat dilakukan dengan pa'tallang.

D. Pa'tallang

Pa'tallang adalah harta yang didapatkan melalui pengorbanan pada upacara rambu solo' di mana harta yang didapatkan masing-masing ahli waris. Apabila ada ahli waris yang tidak turut dalam pengorbanan upacara rambu solo' maka ahli waris tersebut tidak mendapatkan bagian.

Harta warisan yang didapatkan oleh ahli waris yang tidak turut berkorban kepada orang tuanya, hanya dia mendapatkan ba'gi yang dibagikan orang tuanya pada saat dia masih hidup. Harta pewaris yang belum dibagikan kepada ahli waris pada saat pewaris masih hidup secara tidak langsung dipersiapkan untuk diperebutkan oleh anaknya/ahli warisnya melalui pengorbanan ketika orang tuanya meninggal dunia. Pada dasarnya harta pewaris semua anak-anaknya baik anak kandung maupun anak angkat sama-sama berhak mendapatkan harta warisan melalui pa'tallang.

Anak kandung maupun anak angkat tidak dipaksakan dalam kegiatan ini mengingat kemampuannya, tetapi kalau tingkat perekonomiannya cukup, lantas tidak ikut berpartisipasi dalam

kegiatan rambu solo', maka anak tersebut akan dikucilkan dari keluarga pewaris.

Upacara rambu solo' merupakan salah satu prestise dalam masyarakat di Kecamatan Sesean, oleh sebab itu setiap keluarga berusaha mengangkat prestise orang tuanya di dalam masyarakat. Makin banyak kerbau makin tinggi derajatnya dalam masyarakat.

BAB 9



KENDALA YANG MUNCUL DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat yang ada di Kecamatan Sesean memiliki keunikan tersendiri terutama dalam proses pewarisannya. Proses pewarisan pada saat pewaris masih hidup, disebut ba'gi dan proses pewarisan sesudah pewaris meninggal dunia disebut pa'tallang. Pembagian warisan pada saat orang tua masih hidup, kadang kala anak bungsu dilebihkan dari saudara-saudaranya, atau anak tersayang yang mengakibatkan kecemburuan dari saudara-bersaudara. Sedangkan pa'tallang yang pembagiannya didasarkan dengan taksiran oleh penguasa adat bersama dengan pemerintah (kepala lembang/kelurahan) berdasarkan pengorbanannya kepada pewaris.

Menurut Dasius D. Rangan, sekertaris kecamatan (sekcam) di ruang kerjanya bahwa keberadaan lembaga-lembaga pendamai tingkat lingkungan rukun warga (RW)/rukun kampung (RK) yang di koordinir langsung oleh ketua lingkungan RW/RK apabila ada perselisihan antara ahli waris dalam hal pembagian warisan. Tempat keberadaan lembaga-lembaga pendamai di Kecamatan Sesean berada di setiap lingkungan, RW/RK, lembang/kelurahan, dan di ibu kota Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja.

Lembaga-lembaga pendamai bertujuan untuk mendamaikan warganya yang berselisih dalam hal warisan. Apabila ada ada pihak yang merasa dirugikan dalam hal pembagian harta warisan, maka yang bersangkutan mengaduhkan masalahnya ke lembaga pemangku adat dan pemerintah setempat yaitu RW/RK.

perselisian antar warga di lingkungan/RW, To Parengnge' mengundang tokoh-tokoh adat serta kepala lingkungan sebagai wakil pemerintah untuk membicarakan jalan keluarnya. Setelah didamaikan tidak ada istilah menang dan kalah, tujuannya semata-mata mendamaikan warga yang berselisih paham.

Lebih lanjut Nelmon Tangke Allo, camat Sesean menyatakan bahwa proses pembagian warisan tidak selamanya berjalan mulus kadang kala ada salah satu dari ahli waris menganggap pembagian warisan tidak adil berdasarkan taksiran oleh Ambe' Tondok, maka diperlukan lembaga pendamai. Hal ini merupakan peran Ketua RW/RK bersama Ambe' Tondok sebagai Lembaga Pendamai tingkat RW/RK yang disebut Lembaga Adat Pendamai RW/RK. Apabila belum tercapai kesepakatan, maka lanjut ke Lembaga Adat Pendamai Lembang/Kelurahan yang difasilitasi oleh Kepala Lembang/Lurah bersama Ambe' Tondok. Jika masih belum dapat didamaikan, maka lanjut ke Lembaga Adat Pendamai Kecamatan. Lembaga-lembaga adat pendamai tersebut di atas tidak ada istilah kalah atau menang hanya sebatas didamaikan saja. Jika salah satu ahli waris tidak menerima perdamaian tersebut, maka lanjut ke Pengadilan

Secara umum menurut A. Pasoloran pembagian warisan di Kecamatan Sesean tidak terlalu mengalami kesulitan. Kendala yang sering terjadi adalah proses penjatahan kerbau yang akan dikorbankan kepada pewaris. Sebab kadang kala tidak disesuaikan dengan tingkat kemampuan ahli waris. Melalui proses penjatahan itulah mulai muncul permasalahan, sebab ahli waris biasa tidak menyanggupi penjatahan kepadanya. Karena harta pewaris yang belum dibagi pembagiannya berdasarkan dengan pengorbanan oleh ahli waris kepada pewarisnya. Hanya saja dalam hukum adat di Toraja tidak ditentukan berapa banyak hewan kurban untuk mendapatkan sepetak sawah atau ladang, tetapi ditentukan oleh penguasa adat berdasarkan berdasarkan taksiran dengan istilah *ditassere'* oleh tokoh adat yang dihadiri oleh pemerintah setempat

serta dihadiri oleh semua ahli waris serta disepakati secara bersama sama (Hasil Wawancara).

Menurut wawancara peneliti dengan M. L. Tonapa, pa'tallang dilakukan berdasarkan besar kecilnya pengorbanan kepada pewaris. Sebagai contoh pewaris mempunyai anak empat orang, pada saat akan dipestakan ahli waris menanggil To Parengnge' untuk dimintai pendapat mengenai banyaknya kerbau yang akan dikorbankan kepada orang tuanya. Setelah diketahui banyaknya kerbau dan babi yang akan dikorbankan, kemudian dilanjutkan dengan menanyakan kesanggupan oleh masing masing ahli waris dengan difasiltasi oleh To parengnge' dan mengedepankan kemampuan serta tidak memaksakan ahli waris. Namun demikian karena masalah prestise yang dipertahankan itu menyebabkan ahli waris memaksakan diri mengorbankan kerbau dan babi sebanyak-banyaknya. Itulah sebabnya kadang-kadang muncul istilah "La'bi Mala'bi'Tu Matena anna Tuona" artinya semasih hidup sangatlah sederhana, tetapi ketika ia meninggal dunia upacaranya sangat berlebihan (Hasil Wawancara).

Akibatnya, ahli waris memaksakan diri untuk mencari uang membeli kerbau dan babi yang bernilai tinggi guna dikorbankan pada upacara pemakaman pewaris. Hal ini terpaksa dilakukan karena apabila tidak terpenuhi maka dia tidak akan mendapatkan warisan melalui pa'tallang, Warisan yang diperoleh melalui pengorbanan kepada orang tuanya pada dasarnya tidak sebanding, namun demikian bagi orang Toraja memberikan pengorbanan pada orangtua merupakan sesuatu kewajiban, dan apabila itu tidak dilakukan maka akan menghantui perasaan lahir dan batin, karena tidak dapat menguburkan orang tuanya dengan baik.

Faktor-faktor tersebut menyebabkan banyak di antara warga masyarakat di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja yang hanya mementingkan hal semacam itu dan di pihak lain anak dan keturunan yang seharusnya disekolahkan dengan tinggi-tinggi akibatnya anak-anaknya putus sekolah akibat mempertahankan

prestise sebab kasta diKecamatan Sesean masih di pegang teguh oleh Ambe' Tondok, terlepas dari kehidupan sehari-hari tidak berkecukupan karena yang diutamakan untuk upacara rambu solo'.

Telah diuraikan di bagian awal bahwa semua anak mempunyai hak yang sama dalam memperoleh warisan. Untuk itu bagi para pewaris yang mempunyai anak, dan masing-masing anak tersebut harus mempunyai pengorbanan pada pesta upacara rambu solo'. Menurut adat Toraja barang siapa yang banyak memotong babi dan kerbau, maka anak tersebut akan mendapatkan warisan yang lebih banyak.

Pada upacara rambu solo' di Kecamatan Sesean pada umumnya sangat meriah, bahkan banyak dari keluarga yang ingin ikut berkorban kepada pewaris, tetapi yang menentukan ikut tidaknya adalah anak kandung dari pewaris. Keluarga yang ikut berkorban dalam upacara rambu solo' biasanya ditujukan kepada pewaris, sebab pengorbanan keluarga itu adalah tanggung jawab bersama anak-anak dari pewaris untuk pengembaliannya apabila keluarga yang ikut berkorban mengalami hal sama dalam upacara rambu solo'.

Apabila keluarga tidak diikutkan dalam kegiatan upacara rambu solo', mengakibatkan kerenggangan dalam keluarga sebab dengan keikut sertaannya pada upacara tersebut maka dapat mempererat hubungan tali kekeluargaan. Tetapi apabila keikutsertaannya dalam upacara rambu solo' dengan tujuan mengharapkan harta warisan dari pewaris, maka anak-anak dari pewaris berhak untuk melarangnya.

Masyarakat di Kecamatan Sesean apabila ada masyarakat yang dikena musibah dengan spontanitas memberikan bantuan kepada yang berduka secara sukarela, dan itu bukan merupakan hutang, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan. Begitu pula apabila yang memberikan bantuan mengalami hal yang serupa, maka dengan sendirinya yang menerima bantuan tentu berkewajiban memberi bantuan pula.

Menurut Frans Tonapa, kesadaran warga masyarakat di Kecamatan Sesean dalam hal meringankan beban keluarga yang berduka dengan memberikan bantuan bukan lagi berupa barang, akan tetapi berupa uang yang dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan langsung kepada yang berduka. Bantuan semacam ini sangat efektif sebab kalau dengan uang yang berduka dapat memanfaatkan sesuai dengan keperluannya (Hasil Wawancara, di Kelurahan Bori').

Beberapa pernyataan penting dalam buku referensi ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat waris Toraja di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja dilakukan sesudah ahli waris memasuki jenjang rumah tangga. Warisan yang diterima oleh suami istri dapat dijadikan modal awal dalam memulai serta menata hidup berumah tangga. Selanjutnya ahli waris masih mendapatkan bagian harta warisan yang belum dibagikan oleh pewaris pada saat dia masih hidup melalui pa'tallang. Harta yang belum dibagi akan dibagikan oleh penguasa-penguasa adat dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam keluarga.
2. Bentuk harta warisan yang akan dibagi menurut hukum waris di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja adalah harta bawaan suami istri pada saat memasuki rumah tangga, harta pa'tallang yang didapatkan melalui pengorbanan kepada pewaris, harta belangna (harta yang didapat sebelum pernikahan), serta harta bunga rangka'na rampanan kapa' atau harta bersama yang diperoleh bersama melalui ikatan perkawinan.
3. Kendala yang dihadapi dalam pembagian warisan menurut hukum adat waris di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja adalah ahli waris yang tidak mampu dalam mengikuti tradisi dalam upacara rambu

solo' di Kecamatan Sesean dalam hal pa'tallang, tidak akan mendapatkan apa-apa tentang warisan melalui pa'tallang.

4. Konsep Warisan dapat dicanangkan sebagai konsep hukum adat agar lebih memperjelas jenis harta warisan yang dapat beralih kepada ahli waris. Biasanya sebagian warisan yang seharusnya dibagi merata kepada ahli waris, akan tetapi diperebutkan melalui pa'tallang. Dengan demikian ahli waris yang tidak mampu berkorban tidak mendapatkan harta warisan melalui pa'tallang dari pewaris.
5. Dalam pembagian harta warisan terutama ba'gi harus memiliki bukti yang disaksikan oleh penguasa-penguasa adat agar jelas proses dan cara pengalihannya kepada ahli waris.
6. Perlunya ada gambaran dari penguasa-penguasa adat supaya harta warisan yang belum dibagi, dan diperuntukkan untuk pa'tallang, sebagai ahli waris sebaiknya anak kandung yang tidak mampu untuk berkorban mendapatkan warisan sebagai tanda bahwa pembagian warisan melalui pa'tallang yang dikedepankan adalah kebersamaan dalam upacara rambu solo'.

BAB 10

PEDOMAN WAWANCARA, DAFTAR INFORMAN, DAN ISTILAH YANG DIGUNAKAN

Pedoman wawancara tokoh masyarakat

Nama :

Umur :

Alamat :

Laki/Perempuan :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Pertanyaan	Informasi
1. Sebagai tokoh masyarakat adat bagaimanapandangan terhadap hukum masa lalu.	
2. Apakah sekarang ini melihat perubahan zaman di mana hukum Nasional dominan dijadikan pegangan bagi penguasa dalam memutuskan sesuatu.	
3. Menurut Bapak/Ibu apakah masih perlu dipertahankan	

<p>hukum adat di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja.</p> <p>4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap hukum adat di masyarakat sekarang ini</p> <p>5. Bagaimana kebiasaan di kecamatan Sesean dalam hal pembagian warisan</p> <p>6. Apakah pembagian warisan dilakukan dengan mengacu pada hukum adat/ hukum adat Nasional</p> <p>7. Berapa bagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris</p> <p>8. Bagaimana pendapat Anda terhadap anak angkat</p> <p>9. Apakah anak angkat sama kedudukannya dengan anak kandung dalam hal warisan</p> <p>10. Bagaimana cara mengalihkan warisan kepada anak angkat</p> <p>11. Bagaimana anak angkat menurut pandangan adat</p> <p>12. Jika orang tua angkat juga mempunyai anak kandung, bagaimanakah cara pembagian harta warisan</p> <p>13. Bagaimana pandangan keluarga terhadap anak angkat apabila harta warisan diwariskan kepadanya</p>	
---	--

14. Apakah sudah ada aturan hukum adat terhadap pembagian harta warisan tersebut	
15. Bagaimana cara mewariskan harta warisan apabila orang tua meninggal dunia	
16. Bagaimana cara mewariskan harta yang belum dibagi orang tua kepada anaknya apabila orang tua sudah meninggal	
17. Apakah pengorbanan anak kandung/angkat dapat dijadikan dasar untuk menentukan warisan yang belum dibagi pada masa hidupnya	
18. Bagaimana cara menentukan dasar untuk menghargai pengorbanan anak kandung/anak angkat dalam menentukan warisan	
19. Apakah ada perbedaan anak angkat dengan anak kandung dalam hal warisan	
20. Apakah ada ketentuan bahwa umur berapa anak berhak mewarisi harta warisan menurut hukum adat	

Daftar nama informan

Data Informan

Nama	: Y.T. Ramba'
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 45 Tahun
Pekerjaan	: Kelurahan Pangli Selatan
Alamat	: Pangli

Nama	: M.G.Pasang
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 70 Tahun
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Pangli Selatan

Nama	: Dasius D. Rangan
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Umur	: 50 Tahun
Pekerjaan	: Sekertaris kecamatan
Alamat	: Pangli

Nama :Y.P. Mangiwa

Jenis Kelamin :Laki-laki

Umur :45 Tahun

Pekerjaan :Petani

Alamat :Palawa'

Nama :B. Kadang

Jenis Kelamin :Laki-laki

Umur :60 Tahun

Pekerjaan :Petani

Alamat : Bori'Ranteletok

Nama :M. Sarrin

Jenis Kelamin :Laki-laki

Umur :58 Tahun

Pekerjaan :Pesiunan PNS

Alamat :Bori

Nama :S. Padang Allo

Jenis Kelamin :Laki-laki

Umur :50 Tahun
Pekerjaan :Wirasasta
Alamat :Deri

Nama :T. Mambaya
Jenis Kelamin :Laki-laki
Umur :48 Tahun
Pekerjaan :Lurah Pangli
Alamat :Pangli

Nama :Y.T. Pasang
Jenis Kelamin :Laki-laki
Umur :60 Tahun
Pekerjaan :Petani
Alamat :Pangli Selatan

Nama :T. Kadang
Jenis Kelamin :Laki-laki
Umur :50 Tahun
Pekerjaan :Tukang Batu
Alamat :Parinding

Nama : Nelmon Tangke Allo, SE.,M.Si.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Camat Sesean
Alamat : Pangli

Nama :A.Pasoloran
Jenis Kelamin :Laki-laki
Umur :45 Tahun
Pekerjaan :Guru
Alamat :Palawa'

Nama :L.Tonapa
Jenis Kelamin :Laki-laki
Umur :65 Tahun
Pekerjaan :Pensiunan Guru
Alamat :Pangli

Nama :Frans Tonapa
Jenis Kelamin :Laki-laki

Umur :60 Tahun
Pekerjaan :Pensiunan Guru
Alamat :Deri

Nama :K. Pasinggi'
Jenis Kelamin :Laki-laki
Umur :64 Tahun
Pekerjaan :Pensiunan Guru
Alamat :Pangli

Daftar Istilah

Aluk : Adat (Kepercayaan)
Aluk Panda Dibolong : Adat Kematian
Aluk Todolo : Kepercayaan (Animisme)
Ambe' Tondok : Tokoh Adat
Anak poro : Anak Tiri
Arruan : Pemberani
Ba'gi : Warisan
Bunga rangka'na rampanan kapa' : Harta Bersama

Deata	: Penguasa (Dewa)
Deata Kapadanganna	: Penguasa di Bumi
Deata Tangnga Langi'	: Penguasa di Langit
Deata Tangngana Padang	: Penguasa Tanah
Duni	: Peti Mati
Gayang	: Keris
Kada Mellambi'	: Penyampaian
Kalambunan Allo	: Barat
Kandaure	: Manik-manik
Kapuangan	: Bangsawan
Karopi'	: Susunan Batu Berbentuk Persegi
Ka'tu Penaanna	: Meninggal
La'bo Todolo	: Parang Pusaka
Liang	: Kuburan Batu
Ma'dika	: Bangsawan
Mangrara	: Pengucapan Syukur rumah Tongkonan
Mantaa	: Membagi
Mataallo	: Matahari
Ma'waimata	: Pengorbanan yang ditujukan kepada

	orang mati (Piutang)
Membase	: Mencuci
Pa'layu-layu	: Bangsawan Miskin
Pammaka	: Membuat Sawah
Pantunu	: Pengorbanan
Pa'rinding	: Warisan dengan pengorbanan
Pa'tallang	: Warisan dari Pengorbanan
Patane	: Kuburan dari tembok
Pekaamberan	: Tokoh Masyarakat
Pia	: Anak Kecil
Puang, Siambe', Ma'dika	: Bangsawan
Rambu Solo'	: Pesta Orang Mati
Rambu Tuka'	: Pengucapan Syukur
Rampe Matallo	: Sebelah Timur
Rante	: Lapangan (Tempat Upacara Orang Mati)
Rante Simbuang	: Lapangan Upacara
Sarume	: Keluarga terdekat
Solong	: Keluarga jauh
Sukaran Aluk	: Agama
Sundun	: Selesai

Tallu Lembang	: Persaudaraan Tiga Daerah
Tana' Bassi	: Kasta Golongan Kedua (Pemimpin)
Tana' Bulaan	: Kasta Golongan Pertama (pemimpin agama)
Tana' Karurung	: Kasta Golongan Ketiga (orang kebanyakan)
Tana Kua-kua	: Kasta Golongan Terbawah (Budak)
Tedong Balian	: Kerbau dikebiri
Tedong Bongaulu	: Kerbau yang Belangnya di sekitar Kepala
Tedong Pudu'	: Kerbau Hitam
Tedong Saleko	: Kerbau Belang
Tedong Sangpala'	: Kerbau yang Tanduknya Sejengkal
To Manurun	: Orang dari Kayangan
To minaa	: Penguasa Agama
To Pangrengnge'	: Pemangku Adat
Tomembali Puang	: Orang Sudah Meninggal
Tondok Lepongan Bulan Matarik Allo	: Tondok Toraja

Tongkonan

: Rumah Adat

Tongkonan Tang Merambu

: Kuburan (Rumah Tanpa Asap)

DAFTAR PUSTAKA

- Depag. 1999/2000. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Personalia Agama Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Dikbud. 1995. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi Kedua). Jakarta: Reneka Cipta.
- Abdurrahman. 1978. Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia. Bandung: Sumer.
- Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gravindo Versada.
- Djamali, A.,1993. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Grasindo Persada.
- Duli, Akin dan Hasanuddin. 2003. Toraja Dulu dan Kini. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Haar, Ter.1979. Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht, Diterjemahkan oleh Soebekti dalam buku Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Pradya Paramita.
- Haar, Ter. 1994. Azas-asas dan Susunan Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kansil,C.S.T. 1984 Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta. PN Balai Pustaka.

- Katalog BPS. 2007. Kecamatan Sesean Dalam Angka.Rantepao.
- Marampa',A.T. 1980. Mengenal Toraja. Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan.
- Muhammad, B. 1997. Asas-asas Hukum Adat. Jakarta: Pradya Paramita.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjadikoro. 1968. Hukum antar Golongan di Indonesia. Bandung: Sumer.
- Prodjadikoro. 1984. Hukum Kewarisan di Indonesia. Bandung: S. Gravenhage.
- Ramulyo, I. 2000. Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salombe',C. 1973. Orang Toraja Dengan Ritusnya. Tanpa Penerbit.
- Setywyaty, I. 1990. Hukum Adat; Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto. 1997. Meninjau Hukum Adat Indonesia. Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat.
- Soekanto, Soerjono. 2002. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soleman B. 1983. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali.
- Soepomo. 1963. Bab-bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Universitas.
- Soepomo, R. 2003. Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Subekti,R.&Tjitrosudibio. 2004. Kitap Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradya Paramita.
- Suparman, Eman. 1991. Intisari Hukum Waris Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Tangdilintin, L. T. 1980. Upacara Pemakaman Adat Toraja. Tana Toraja Yayasan Lepongan Bulan.
- Tangdilintin, L.T. 1978. Sejarah dan Pola-Pola Hidup Suku Toraja. Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan.
- Utrecht. 1964. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Litier.
- Wijodiporo, Surojo. 1984. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat.
- Yunus,A.Assaad. 1987. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Al-Qushwa.

RIWAYAT PENULIS

Ritha Tuken, lahir di Rembon Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 17 Juni 1963, anak dari pasangan M. Tulak dengan Y. Kendek menempuh pendidikan di SD Bersubsidi Tampo Mengkendek Kabupaten Tana Toraja dan tamat pada tahun 1974, lalu melanjutkan pendidikan di SMPN Makale Kabupaten Tana Toraja dan tamat tahun 1978, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan SMA Negeri I Makale dan tamat pada tahun 1981.

Pada tahun 1981 melanjutkan pendidikan di IKIP Ujung Pandang pada jurusan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewargaan Negara Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, tamat tahun 1986 dan mengajar di SPG Neg. Parepare pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1991. Pada tahun yang sama integrasi pada IKIP Ujung Pandang di PGSD UPP Parepare FIP Ujung Pandang karena semua SPG dan SGO di Seluruh Indonesia ditutup karena dianggap yang mengajar di SD harus melalui perguruan tinggi.

Menikah dengan Drs Yonathan Saba' Pasinggi, M.Pd pada tahun 1989. Pada tahun 1990 dikaruniai anak perempuan dengan nama Alvionitha Yori Pasinggi, pada tahun 1993 lahir anak kedua perempuan dengan nama Sabrianti Pasinggi, kemudian pada tahun 1996 lahirlah anak ketiga laki-laki dengan nama Irgayanto Pasinggi. Pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan S2. pada Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar dengan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kekhususan Pendidikan Hukum dan Kewarganegaraan dan akhirnya menyusun tesis dengan judul "Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Sesean Kabupaten Tana Toraja Berdasarkan Hukum Adat."

